

RENCANA STRATEGIS

Tahun 2020-2024

REVISI III

**BALAI BESAR PELATIHAN MANAJEMEN DAN
KEPEMIMPINAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan ridho-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 (Revisi III) Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 279/Kpts/OT.050/M/06/2023 Tentang Kelompok Substansi Dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian, maka Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) mengalami perubahan nomenklatur menjadi Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) yang kemudian juga melakukan perubahan ketiga terhadap Renstra yang telah disusun sebelumnya.

Renstra Revisi III ini diharapkan dapat dijadikan acuan guna mencapai target yang telah ditetapkan, di antaranya adalah peningkatan kompetensi sumberdaya manusia pertanian. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala usaha dan upaya kita untuk berkontribusi aktif dalam mensukseskan pembangunan nasional, khususnya di bidang pertanian.

Ciawi, November 2023
Kepala Balai Besar,



Ir. Yusral Tahiri, M.Agr. ✚
NIP. 196406081990101001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	4
BAB II GAMBARAN ORGANISASI	5
2.1. Sasaran Umum dan Strategi Utama	6
2.1.1. Sasaran Umum (Visi)	6
2.1.2. Strategi Utama (Misi)	8
2.1.3. Tujuan Kegiatan	9
2.1.4. Sasaran Kegiatan	10
2.2. Struktur Organisasi	14
2.3. Keragaan Organisasi	15
2.3.1. Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian	15
2.3.2. Dinamika Sumber Daya Manusia Kediklatan	15
2.3.3. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kediklatan	16
2.3.4. Penumbuhan dan Penguatan P4S	17
2.3.5. Kerjasama Pelatihan dan Magang	17
2.3.6. Pendanaan dan Realisasi	18
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	19
3.1. Identifikasi Lingkungan Strategis BBPMKP	19
3.1.1. Internal	19
3.1.2. Eksternal	21
3.2. Analisa SWOT	23
3.3. Arah Kebijakan	30
3.3.1. Arah Kebijakan Kementerian Pertanian	30
3.3.2. Arah Kebijakan BPPSDMP	34

3.3.3. Arah Kebijakan BBPMKP	35
3.4. Strategi	35
3.4.1. Strategi Kementerian Pertanian	35
3.4.2. Strategi BPPSDMP	36
3.4.3. Strategi BBPMKP	42
3.5. Kerangka Kelembagaan	45
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	47
4.1. Struktur Program dan Kegiatan BBPMKP	47
4.2. Kegiatan Utama BBPMKP	47
4.3. Sasaran BBPMKP	50
4.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)/ Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) Dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	52
4.4.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	52
4.4.2. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	53
4.5. Kerangka Pendanaan	58
BAB V PENUTUP	65

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	Pokok-pokok Sasaran Umum Tahun 2020-2025 BBPMKP	7
Tabel 2	Target dan Realisasi Output Pelatihan Pertanian di BBPMKP Tahun 2015-2019	15
Tabel 3	Jumlah SDM Kediklatan di BBPMKP Tahun 2015-2019	16
Tabel 4	Jumlah Tenaga Pelatihan yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kompetensi di BBPMKP Tahun 2015-2019	16
Tabel 5	Penumbuhan dan Penguatan P4S Binaan BBPMKP Tahun 2015-2019	17
Tabel 6	Realisasi Kerjasama Pelatihan/Magang di BBPMKP Tahun 2015-2019	17
Tabel 7	Target dan Realisasi Anggaran BBPMKP Tahun 2015-2019	18
Tabel 8	Analisa SWOT	23
Tabel 9	Struktur Program dan Kegiatan Berdasarkan Fungsi	47
Tabel 10	Indikator Kinerja Utama/Indikator Kerja Sasaran Program BPPSDMP Tahun 2020-2024.....	52
Tabel 11	Indikator Kinerja Utama/Indikator Kerja Sasaran Program BPPSDMP Tahun 2020-2024 (Revisi)	53
Tabel 12	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian BBPMKP Tahun 2020-2024	54
Tabel 13	Rincian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan BBPMKP Tahun 2020-2024	54
Tabel 14	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan BBPMKP Tahun 2020-2024 (Revisi I)	55
Tabel 15	Rincian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan BBPMKP Tahun 2020-2024 (Revisi I)	56

.....	
Tabel 16 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan BBPMKP Tahun 2020-2024 (Revisi II)	57
Tabel 17 Rincian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan BBPMKP Tahun 2020-2024 (Revisi II)	57
Tabel 18 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian BBPMKP Tahun 2020	58
Tabel 19 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian BBPMKP Tahun 2021-2022	60
Tabel 20 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian BBPMKP Tahun 2023-2024	62

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Peta Strategi Kementerian Pertanian Tahun 2020 - 2024	11
Gambar 2 Struktur Organisasi BBPMKP	14
Gambar 3 Cara Bertindak (CB) Kementerian Pertanian	36

DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|------------|--|
| Lampiran 1 | Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian. |
| Lampiran 2 | Wilayah Kerja Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian. |
| Lampiran 3 | Prasarana dan Sarana Pendukung di Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian. |
| Lampiran 4 | Data Ketenagaan Pelatihan di Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian. |
| Lampiran 5 | Data Widyaiswara di Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Ciawi. |
| Lampiran 6 | Jumlah Kelembagaan Pusat Pelatihan Pertanian Swadaya (P4S) Berdasarkan Klafikasi Binaan Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Ciawi Tahun 2022. |
| Lampiran 7 | Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan BBPMKP Tahun 2020-2024. |

Lampiran1

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP)

No	Dokumen
1	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
2	Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 279/Kpts/OT.050/M/06/2023 Tentang Kelompok Substansi Dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian

Lampiran 2

Wilayah Kerja Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Nomor 141/Kpts/OT.220/I/08/18 tentang Pembagian Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan di lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

No	Jenis Pelatihan	Wilayah Kerja
1	Manajemen dan Kepemimpinan	Nasional
2	Pembinaan Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) dan Ikatan Alumni Magang Jepang (IKAMAJA)	Provinsi: (1) DKI Jakarta (2) Jawa Tengah

Lampiran 3

Prasarana dan sarana pendukung di Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP)

No	Prasarana/Sarana	Volume	Kapasitas (orang)	Keterangan
	KOMPLEK BUMI			
1	Asrama	8 unit	178	baik
2	Aula	1 unit	250	baik
3	Kelas	5 unit	310	baik
4	Guest House	3 unit	16	baik
5	Ruang Makan	1 unit		baik
6	Lapangan parkir	1.875 m2		baik
	KOMPLEK BINA KARAKTER			
1	Asrama	1 unit	40	baik
2	Aula	1 unit	300	baik
3	Lapangan tenis			baik
4	Ruang Makan			baik
5	Lapangan parkir luas			baik
	KOMPLEK TIRTA			
1	Asrama	3 unit	127	baik
2	Aula	1 unit	250	baik
3	Kelas	4 unit	160	baik
4	Ruang Makan			baik
5	Gedung Perpustakaan			baik
6	Lapangan parkir luas			baik
	KOMPLEK MEGA			
1	Asrama	2 unit	70	baik
2	Kelas	2 unit	120	baik
3	Ruang Makan			baik
4	Klinik Kesehatan			baik
5	Stasiun Radio Pertanian Ciawi			baik
6	Lapangan parkir luas			baik
7	ATM			
	KOMPLEK SURYA			
1	Asrama	5 unit	172	baik
2	Aula	1 unit	200	baik
3	Kelas	4 unit	190	baik
5	Guest House	3 unit	6	baik
4	Ruang Makan	1 unit		baik
6	Lapangan parkir luas	1.875 m2		baik
	KOMPLEK CANDRA			
1	Gedung Pusat Administrasi dan Perkantoran			baik

Lampiran 4

Data Ketenagaan Pelatihan di Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP)

A. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Jumlah
S3	7
S2	24
S1	22
D3	3
D2	1
D1	-
SLTA	38
SLTP	15
SD	15
Total	125

Sumber data: Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha 2023

B. Berdasarkan Golongan Ruang

Golongan Ruang	Jumlah
Golongan I	-
Golongan II	30
Golongan III	63
Golongan IV	22
Total	115

Sumber data: Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha 2023

Lampiran 5

Data Widyaiswara di Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP)

A. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Jumlah
S3	7
S2	14
S1	1
Total	22

B. Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah
Widyaiswara Ahli Pertama	2
Widyaiswara Ahli Muda	8
Widyaiswara Ahli Madya	7
Widyaiswara Ahli Utama	5
Total	22

C. Berdasarkan Spesialisasi

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	SPECIALISASI MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN			PELATIHAN FUNGSIONAL NON BIDANG PERTANIAN DAN PROFESI
			PKP	PKA	LATSAR CPNS	
1	Ir. Yusni Emilia Harahap, MM NIP. 195903221983062001	Pembina Utama, IV/e Widyaiswara Ahli Utama	Agenda Kepemimpinan dan Pelayanan Diagnosa Organisasi	Agenda Kepmimpinan Kinerja Kepemimpinan Transformasional	Komitmen Mutu <i>Whole of Government</i> Isu Kontemporer	Nilai Tambah dan Daya Saing Strategi Pemasaran Hasil Pertanian
2	drh. Sumarno, MM NIP. 195804121986031001	Pembina Utama Madya, IV/e Widyaiswara Ahli Utama	Agenda Kepemimpinan dan Pelayanan Diagnosa Organisasi	Agenda Kepmimpinan Kinerja Manajemen Perubahan	Aktualisasi Manajemen ASN	Pendidikan orang Dewasa
3	Dr. Ir. Winny Dian Wibawa, M.Sc NIP. 195903291984031002	Pembina Utama Madya, IV/e Widyaiswara Ahli Utama Pembina Utama Madya, IV/e	Kepemimpinan Pancasila dan Bela Negara Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Bela Negara dan Kepemimpinan Pancasila	Agenda Pengelolaan Diri Dalam Bela Negara Wawasan Kebangsaan Kepemimpinan Pancasila Bela Negara Kepmimpinan Pancasila	Etika Publik Isu Kontemporer	Perencanaan Kelembagaan Penyuluhan
4	Dr. Ir. Bambang Budhianto NIP. 196105261985031002	Pembina Utama Madya, IV/e Widyaiswara Ahli Utama	Agenda Pengendalian Pekerjaan Manajemen Mutu	Agenda Manajemen Kerja Manajemen Resiko	Komitmen Mutu Wawasan Kebangsaan	Manajemen Mutu
5	Dr. Ir. Widi Hardjono, M.Sc NIP. 195812011987031001	Pembina Utama Madya, IV/d Widyaiswara Ahli Utama	Agenda Pengendalian Pekerjaan Pelayanan Publik Digital	Agenda Pengelolaan Diri Dalam Bela Negara Wawasan Kebangsaan Kepemimpinan Pancasila Bela Negara Kepmimpinan Pancasila	Isu Kontemporer Komitmen Mutu	
6	Ir. Susanto, MM NIP.	Pembina Utama Madya, IV/d				

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	SPECIALISASI MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN			PELATIHAN FUNGSIONAL NON BIDANG PERTANIAN DAN PROFESI
			PKP	PKA	LATSAR CPNS	
	196205071992031001	Widyaiswara Ahli Utama				
7	R. Achmad Randoni, SE, MM NIP. 196401281985031002	Pembina Utama Muda, IV/c Widyaiswara Ahli Madya	Agenda Kepemimpinan dan Pelayanan Membangun Tim Efektif	Agenda Kepemimpinan Kinerja Manajemen Konflik Komunikasi Efektif	Anti Korupsi Manajemen ASN	Metoda Penyuluhan
8	Lalu Ismail, SP., M.Sc NIP. 196712311987031002	Pembina Utama Muda, IV/c Widyaiswara Ahli Madya	Agenda Kepemimpinan dan Pelayanan Kepemimpinan dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Agenda Manajemen Kerja Manajemen Kinerja	Anti Korupsi <i>Whole of Government</i> Akuntabilitas	Komunikasi Penyuluhan Pembuatan Media Pembelajaran Agribisnis
9	Abdul Hari, SP, MM NIP. 196504201991031003	Pembina, IV/c Widyaiswara Ahli Madya			Wawasan Kebangsaan Nasionalisme Manajemen ASN	Komunikasi Penyuluhan Pengarusutamaan Gender Kehumasan
10	Renata Dayang N.D, SP, MM NIP. 197408292002122001	Pembina, IV/a Widyaiswara Ahli Muda	Agenda Pengendalian Pekerjaan Manajemen Pengawasan			
11	Susan Twisawati Indiani, SE, MM NIP. 197207171997032001	Pembina, IV/a Widyaiswara Ahli Muda				
12	Eri Herlina, SE, M.Pd NIP. 196604142001122001	Pembina, IV/a Widyaiswara Ahli Muda				
13	Dr. Wtwik Yuniarti, SP, M.Si NIP. 198306252006042001	Pembina, IV/a Widyaiswara Ahli Madya			Nasionalisme Manajemen ASN	Komunikasi Penyuluhan Pemberdayaan Kelompok
14	Dr. Milko Harjanti, SE, M.SE, MA	Pembina, IV/a	Kepemimpinan Pancasila dan Bela Negara		Akuntabilitas	Akuntansi Keuangan

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	SPECIALISASI MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN			PELATIHAN FUNGSIONAL NON BIDANG PERTANIAN DAN PROFESI
			PKP	PKA	LATSAR CPNS	
	NIP. 198008142006042001	Widyaiswara Ahli Madya	Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Bela Negara dan Kepemimpinan Pancasila			
15	Dr. Triane Widya Anggriani, SP, ME NIP. 198210122006042001	Penata Tk I, III/d Widyaiswara Ahli Muda			Komitmen Mutu	Pengembangan Agribisnis
16	Dr. Dea CUIJ,S.TP., M.Agr.Sc., M.AP NIP. 198206102006042001	Penata Tk I, III/d Widyaiswara Ahli Muda			Komitmen Mutu	Strategi Pemasaran Hasil Pertanian Metoda Penyuluhan
17	Binda Kharismarina Widowati, SH NIP. 198007092009012003	Penata Tk I, III/d Widyaiswara Ahli Muda	Agenda Kepemimpinan dan Pelayanan Kepemimpinan dalam Pelaksanaan Pekerjaan		Komitmen Mutu <i>Whole of Government</i>	Pengelolaan BMN Metodologi Pelatihan
18	Ifan Arildarma, S.Sos, MM NIP. 197305091998031001	Pembina, IV/a Widyaiswara Ahli Madya	Kepemimpinan Pancasila dan Bela Negara Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Bela Negara dan Kepemimpinan Pancasila		Akuntabilitas Wawasan Kebangsaan <i>Whole of Government</i>	Kehumasan Pembelajaran Berbasis Multimedia
19	Martin Herpriyana, SP NIP. 198403032009121003	Penata Muda Tk. I, III/b Widyaiswara Ahli Pertama			Etika Publik	Pembelajaran Berbasis Multimedia Komunikasi Penyuluhan
20	Viera Restuani Adia S.I.Kom. MA. NIP.	Penata, III/c Widyaiswara Ahli				

RENCANA STRATEGIS TAHUN
(REVISI III) 2020-2024

BALAI BESAR PELATIHAN MANAJEMEN DAN
KEPEMIMPINAN PERTANIAN

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	SPESIALISASI MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN			PELATIHAN FUNGSIONAL NON BIDANG PERTANIAN DAN PROFESI
			PKP	PKA	LATSAR CPNS	
	197004282002122001	Muda				
21	Y. Saptiana Oktari, MBA NIP. 198810222018012001	Penata, III/c Widyaiswara Ahli Muda			Akuntabilitas <i>Whole Of Government</i>	
22	Fadia Hanum Fristiannisa, S.A.P., M.Si NIP. 199008282018022001	Penata Muda Tk. I, III/b Widyaiswara Ahli Pertama			Nasionalisme Pelayanan Publik	

Lampiran 6

Jumlah Kelembagaan Pusat Pelatihan Pertanian Swadaya (P4S) Berdasarkan Klasifikasi Binaan Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) Tahun 2022

No	Kelas	Jumlah
DKI Jakarta		
1	Kelas Pratama	24
2	Kelas Madya	15
3	Kelas Utama	5
Jawa Tengah		
1	Kelas Pratama	155
2	Kelas Madya	119
3	Kelas Utama	18
TOTAL		292

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Pertanian mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia karena berfungsi sebagai penyedia pangan, pakan untuk ternak, dan bioenergi. Peran pertanian sangat strategis dalam mendukung perekonomian nasional, terutama mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan. Selain itu, mendorong pertumbuhan agroindustri di hilir dan memacu ekspor komoditas pertanian untuk meningkatkan devisa negara. Di sisi lain, penyediaan kebutuhan pangan masyarakat merupakan tugas utama yang tidak ringan, Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan jumlah penduduk Indonesia pada 2045 akan mencapai 319 juta jiwa atau meningkat 52 juta jiwa dibandingkan Tahun 2020 sebanyak 267 juta jiwa.

Dalam rangka menyediakan pangan masyarakat sebagai wujud ketahanan pangan dalam negeri yang telah dituangkan ke dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, maka sektor pertanian ditargetkan berkontribusi secara riil terhadap peningkatan sasaran makro pembangunan. Secara nasional, diperkirakan pertumbuhan ekonomi lima tahun ke depan diharapkan meningkat sampai 5,7-6,0% per tahun, yang didorong oleh peningkatan produktivitas, investasi berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pada tahun 2024, peningkatan kualitas ekonomi ditandai dengan perbaikan indikator makro ekonomi Indonesia di antaranya stabilisasi inflasi, turunnya tingkat kemiskinan, turunnya tingkat pengangguran, turunnya tingkat rasio gini dan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pada RPJMN keempat (Tahun 2020-2024) ini, masyarakat Indonesia diharapkan sudah mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang termasuk di sektor pertanian. Kebijakan pembangunan pertanian dan pangan diarahkan untuk mewujudkan pertanian maju, mandiri dan modern untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan petani. Pencapaian kebijakan ini dilakukan dengan empat (4)

strategi atau cara bertindak, yaitu : (1) peningkatan produktivitas tanaman pangan di lahan pertanian alternatif potensial yang belum digarap, (2) diversifikasi pangan lokal agar makanan pokok masyarakat tidak bertumpu pada beras, (3) perkuatan cadangan logistik di lumbung pangan nasional yang saat ini dikelola Bulog, dan (4) modernisasi dan mekanisasi pertanian dengan pendekatan teknologi dan peran ahli milenial, yang digambarkan dengan *smart farming*, *green house*, menggunakan sungkup, mulsa, dan pendekatan korporasi pertanian termasuk *food estate*.

Kementerian Pertanian menetapkan visi Pertanian Jangka Menengah 2020-2024 yakni Pertanian yang maju, mandiri dan modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Adapun misi Kementerian Pertanian yaitu: (1) Mewujudkan ketahanan pangan, (2) Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta (3) Pengelolaan Kementerian Pertanian yang bersih, efektif dan terpercaya.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) sebagai unit kerja Eselon I Kementerian Pertanian memiliki mandat untuk menyiapkan SDM pertanian yang profesional, mandiri, berdaya saing dan berjiwa wirausaha. Pengembangan SDM pertanian telah dijabarkan secara rinci, sehingga harus menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan SDM Pertanian tahun 2020-2024 dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian tahun 2020-2024.

BPPSDMP menetapkan sasaran umum pembangunan pertanian tahun 2020-2024 sebagai berikut: “Terwujudnya Sumber Daya Manusia Pertanian yang Profesional, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berjiwa Wirausaha dalam Mewujudkan Pertanian Maju, Mandiri dan Modern”, yang merupakan penerjemahan dari sasaran umum Kementerian Pertanian tahun 2020-2024, yaitu; “Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Adapun strategi utama untuk mencapai sasaran umum tahun 2020-2024, yaitu: (1) memantapkan sistem penyuluhan pertanian terpadu dan modern, (2) memantapkan pendidikan vokasi pertanian yang kompetitif, (3) memantapkan sistem pelatihan vokasi pertanian berbasis kompetensi dan daya saing, dan (4) memantapkan reformasi birokrasi.

Sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 279/Kpts/OT.050/M/06/2023 Tentang Kelompok Substansi Dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian, maka Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) mengalami perubahan nomenklatur menjadi Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP). BBPMKP merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPPSDMP yang melaksanakan pelatihan manajemen, kepemimpinan, dan multimedia bagi aparatur dan non aparatur pertanian, pelatihan dasar, dan pelatihan fungsional nonbidang pertanian bagi aparatur pertanian, serta mengembangkan model dan teknik pelatihan manajemen, kepemimpinan dan multimedia. BBPMKP tetap mengacu pada sasaran umum dan strategi utama instansi pembina di pusat dalam menetapkan arah kebijakan guna mewujudkan visi dan misi pembangunan pertanian. Terlebih di era revolusi industri 4.0 seperti saat ini, BBPMKP sebagai lembaga pelatihan perlu melakukan upaya transformasi digital guna mengadaptasi perubahan teknologi yang sangat cepat.

Sejalan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa setiap instansi pemerintah dalam melaksanakan perencanaan harus mengikuti kaidah-kaidah sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar pembangunan bisa berjalan efektif dan efisien, maka setiap instansi pemerintah juga perlu membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), atau sering disebut sebagai Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra KL).

BBPMKP juga perlu melakukan penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) sebagai penjabaran dari Renstra BPPSDMP dan Puslatan. Renstra ini merupakan kelanjutan dari Renstra periode 2015-2019, dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang sudah berlangsung dan memperkirakan adanya perubahan lingkungan strategis yang akan terjadi. Pandemi *Corona Virus Disease 19* (Covid-19) masih menjadi tantangan besar bagi seluruh sektor. Renstra tersebut diharapkan dapat memotret kesiapan BBPMKP untuk menghadapi tantangan dan menangkap peluang menjadi arah kebijakan yang dijabarkan dalam kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran, indikator, target,

dan alokasi pendanaan untuk menjalankan fungsi manajemen, koordinasi, dan tugas teknis lainnya periode pembangunan tahun 2020-2024 yang selanjutnya digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra BBPMKP Tahun 2020–2024 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja BBPMKP. Adapun tujuan penyusunan Renstra BBPMKP Tahun 2020- 2024 adalah:

- a. Menjamin keselarasan antara sasaran umum, strategi utama, tujuan dan sasaran kegiatan pelatihan pertanian dengan tujuan dan sasaran BPPSDMP dan Puslatan, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.
- b. Sebagai landasan operasional dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBN, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- c. Memudahkan dalam mengukur pencapaian tujuan yang telah direncanakan dalam bentuk indikator keberhasilan.
- d. Sebagai acuan BBPMKP dalam menyusun Kerja Tahunan (RKT).

BAB II

GAMBARAN ORGANISASI

Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) adalah UPT dengan tingkat eselon II yang berada di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) dan secara teknis dibina oleh Pusat Pelatihan Pertanian (Puslatan) yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pelatihan manajemen, kepemimpinan, dan multimedia bagi aparatur dan non aparatur pertanian, pelatihan dasar, dan pelatihan fungsional nonbidang pertanian bagi aparatur pertanian, serta mengembangkan model dan teknik pelatihan manajemen, kepemimpinan dan multimedia. Adapun fungsi BBPMKP adalah sebagai berikut:

- a. penyusunan program, rencana kerja, anggaran, dan pelaksanaan kerjasama;
- b. pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- c. pelaksanaan penyusunan bahan standar kompetensi kerja di bidang manajemen dan kepemimpinan, serta fungsional nonbidang pertanian;
- d. pelaksanaan pelatihan manajemen, kepemimpinan, dan multimedia bagi aparatur dan non aparatur dalam dan luar negeri;
- e. pelaksanaan pelatihan dasar bagi aparatur;
- f. pelaksanaan pelatihan fungsional nonbidang pertanian bagi aparatur;
- g. pelaksanaan pelatihan profesi di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur;
- h. pelaksanaan uji kompetensi di bidang manajemen dan kepemimpinan pertanian bagi aparatur;
- i. pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan manajemen dan kepemimpinan, serta fungsional nonbidang pertanian;
- j. pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan di bidang manajemen, kepemimpinan, dan multimedia pertanian;
- k. pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
- l. pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang manajemen, kepemimpinan, dan multimedia pertanian;
- m. pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur;

- n. pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan, serta pengembangan model dan teknik pelatihan manajemen, kepemimpinan dan multimedia pertanian;
- o. pengelolaan unit inkubator manajemen;
- p. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang manajemen, kepemimpinan dan multimedia pertanian;
- q. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan dan pelaporan;
- r. pelaksanaan pengelolaan sarana teknis dan unit multimedia pertanian; dan
- s. pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha, keuangan, rumah tangga dan penatausahaan barang milik negara.

1. SASARAN UMUM DAN STRATEGI UTAMA

2.1.1. Sasaran Umum (Visi)

Kementerian Pertanian menetapkan sasaran umum Pembangunan Pertanian Jangka Menengah Tahun 2020-2024, yakni: “Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Sasaran umum tersebut menggambarkan majunya sektor pertanian ditandai dengan meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan serta mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri (pangan mandiri) yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani. Kemajuan dan kemandirian di sektor pertanian diwujudkan dengan peningkatan hasil pengembangan penelitian terapan didukung oleh kualitas SDM dalam menggunakan teknologi modern berbasis kawasan pertanian.

Mengingat pengembangan SDM pertanian pada tahun 2020-2024 sangat strategis, maka BPPSDMP menetapkan sasaran umum, yakni: “Terwujudnya Sumber Daya Manusia Pertanian yang Profesional, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berjiwa Wirausaha dalam Mewujudkan Pertanian Maju, Mandiri dan Modern”.

Puslatan sebagai salah satu pilar BPPSDMP, menetapkan sasaran umum tahun 2020-2024 menetapkan sasaran umum: “Terwujudnya Sumber Daya Manusia pertanian yang Profesional, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berjiwa Wirausaha dalam Mewujudkan Pertanian Maju, Mandiri dan Modern melalui pelatihan pertanian dan sertifikasi profesi”.

Memperhatikan tugas dan fungsi, potensi, capaian hasil pada periode sebelumnya, permasalahan, dan tantangan yang ada, BBPMKP menetapkan sasaran umum tahun 2020-2024: “Terwujudnya Sumber Daya Manusia pertanian yang Profesional, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berjiwa Wirausaha dalam Mewujudkan Pertanian Maju, Mandiri dan Modern melalui pelatihan pertanian dan sertifikasi profesi”.

Adapun pokok-pokok sasaran umum Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1
Pokok-Pokok Sasaran Umum Tahun 2020-2025 BBPMKP

Pokok-Pokok Sasaran Umum	Makna Sasaran Umum
SDM Pertanian yang Profesional	SDM pertanian yang memiliki kompetensi, sesuai dengan profesi yang ditekuni, mempunyai pengetahuan, sikap, keterampilan, motivasi dan atribut lain yang diperlukan agar dapat berhasil dalam pekerjaannya. (Renstra BPPSDMP)
SDM Pertanian yang Mandiri	Sumber daya manusia pertanian yang selalu bersikap dan berperilaku yang lebih mengandalkan inisiatif, kemampuan dan tanggung jawab pada diri sendiri secara konsekuen dan menghindari dari sikap ketergantungan pada orang lain. (Renstra BPPSDMP)
SDM Pertanian yang Berdaya Saing	Sumber daya manusia pertanian yang memiliki kemampuan untuk menghadapi hambatan atau kemampuan untuk meraih kesuksesan. (Renstra BPPSDMP).
SDM Pertanian yang Berjiwa Wirausaha	Sumber daya manusia yang memiliki jiwa dan semangat enterpreunership, bekerja di sektor pertanian dari hulu dan/atau hilir, serta mampu membuka lapangan pekerjaan dan akses pasar di sektor pertanian. (Renstra BPPSDMP).
Pertanian Maju	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian yang mampu meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraannya. Apabila ditinjau dari indikator ekonomi, dicirikan dengan kestabilan lembaga dan pranata pertanian dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menyumbang penciptaan/penyerapan tenaga kerja. Pertanian maju ditandai dengan peran serta masyarakat secara nyata dan efektif dalam pembangunan pertanian. (Renstra BPPSDMP).

Pokok-Pokok Sasaran Umum	Makna Sasaran Umum
Pertanian Mandiri	Pembangunan pertanian berdasarkan kemampuan dalam negeri sesuai dengan kondisi masyarakat. Pertanian mandiri diindikasikan dengan memiliki kemampuan ilmu pengetahuan dalam pengelolaan sumber daya pertanian, memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dalam memenuhi kebutuhan pembangunan pertanian, mampu mendorong tumbuhnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang maju dan memiliki kemampuan mendorong tumbuhnya kreativitas untuk selalu aktif dan bekerjasama dengan pihak lain. (Renstra BPPSDMP).
Pertanian Modern	Pembangunan pertanian berbasis inovasi yang sejalan dengan revolusi industri 4.0. Untuk mewujudkan pertanian maju, mandiri dan modern tidak lepas dari peran SDM pertanian yang profesional, mandiri, berdaya saing dan berjiwa wirausaha. (Renstra BPPSDMP).
Pelatihan	Setiap usaha/upaya untuk memperbaiki performa pekerja pada pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung jawabnya atau pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaannya (Permentan 37 Tahun 2018).
Pertanian	Kegiatan mengelola sumberdaya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem (Permentan 37 Tahun 2018).
Sertifikasi Profesi	Proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai dengan SKKNI, Standard Internasional, dan/ atau Standard Khusus (Permentan 37 Tahun 2018).

Sumber: Renstra Puslatan tahun 2020-2024 diolah.

2.1.2. Strategi Utama (Misi)

Percepatan pembangunan pertanian tahun 2020-2024 perlu dilakukan secara terencana, oleh karena itu Kementerian Pertanian menetapkan strategi utama Kementerian Pertanian tahun 2020-2024, yaitu: (1) Mewujudkan ketahanan pangan; (2) Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian; serta (3) Pengelolaan Kementerian Pertanian yang bersih, efektif dan terpercaya.

BPPSDMP menetapkan strategi utama dalam mendukung strategi utama Kementerian Pertanian tahun 2020-2024, yaitu: (1) Menyelenggarakan Sistem Penyuluhan Pertanian yang Terpadu dan Modern; (2) Menyelenggarakan Pendidikan Vokasi Pertanian yang Kompetitif; (3) Menyelenggarakan sistem

pelatihan vokasi pertanian berbasis kompetensi dan daya saing; dan (4) Menyelenggarakan reformasi birokrasi.

Mengacu pada Strategi Utama dari Kementerian Pertanian dan BPPSDMP, maka BBPMKP perlu menetapkan strategi utama yang mendukung, yakni: (1) Menyelenggarakan sistem pelatihan vokasi pertanian berbasis kompetensi dan daya saing; dan (2) Menyelenggarakan reformasi birokrasi.

2.1.3. Tujuan

Tujuan Kementerian Pertanian 2020-2024 sesuai dengan Visi dan Misi Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut: (1) Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan, (2) Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian, (3) Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian, (4) Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian, dan (5) Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian.

Indikator Kinerja dalam 2020-2024 (PERPRES nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024) dan Indikator Kinerja Menteri Pertanian yang didelegasikan oleh Kementerian Pertanian kepada BPPSDMP meliputi: (1) Persentase petani yang menerapkan teknologi (persen); (2) Persentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya (persen), dan (3) Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya (orang).

Untuk mencapai target indikator yang telah ditetapkan, BPPSDMP menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Penguatan dan pengembangan penyuluhan serta korporasi petani untuk peningkatan penerapan teknologi oleh petani, dengan indikator tujuan :
 - a. Persentase petani yang menerapkan teknologi dengan target 70 % (tahun 2020) sampai dengan 90 % (tahun 2024)
 - b. Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya dengan target 18 % (tahun 2020) sampai dengan 22 % (tahun 2024).
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian untuk peningkatan produktivitas sumber daya manusia pertanian, dengan indikator Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya dengan target 60 % (tahun 2020) sampai dengan 90 % (tahun 2024).

3. Penyelenggaraan pendidikan, penumbuhan dan pengembangan wirausaha muda pertanian untuk peningkatan kualitas lulusan pendidikan vokasi pertanian, dengan indikator Persentase lulusan Pendidikan Vokasi pertanian yang bekerja dibidang pertanian dengan target 65 % (tahun 2020) sampai dengan 90 % (tahun 2024).
4. Peningkatan Reformasi Birokrasi BPPSDMP yang efektif dan efisien, dengan indikator Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) BPPSDMP dengan target nilai 33,25 (tahun 2020) sampai dengan nilai 34,25 (tahun 2024).
5. Pengelolaan Anggaran BPPSDMP yang akuntabel dan berkualitas, dengan indikator Nilai kinerja anggaran BPPSDMP dengan target nilai 90 (tahun 2020) sampai dengan 90,80 (tahun 2024).

Guna mendukung pencapaian target indikator yang telah ditetapkan oleh BPPSDMP, maka BBPMKP menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian untuk peningkatan produktivitas sumber daya manusia pertanian, dengan indikator Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya dengan target 60 % (tahun 2020) sampai dengan 90 % (tahun 2024) dan Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan pertanian dengan target 3,90 (skala likert) sampai dengan 3,94 (skala likert).
2. Peningkatan Reformasi Birokrasi BPPSDMP yang efektif dan efisien, dengan indikator Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) BPPSDMP dengan target nilai 33,25 (tahun 2020) sampai dengan nilai 34,25 (tahun 2024).
3. Pengelolaan Anggaran BPPSDMP yang akuntabel dan berkualitas, dengan indikator Nilai kinerja anggaran BPPSDMP dengan target nilai 90 (tahun 2020) sampai dengan 90,80 (tahun 2024).

2.1.4. Sasaran

Sasaran Strategis Kementerian Pertanian disusun berdasarkan target yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024, dengan memperhatikan hasil evaluasi kebijakan pertanian sebelumnya, isu strategis saat ini dan prakiraan ke depan, dan mengakomodasikan aspirasi masyarakat.

Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin dicapai Kementerian Pertanian dalam periode Tahun 2020-2024 adalah:

- SS1. Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas.
- SS2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian.
- SS3. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian.
- SS4. Meningkatnya Kualitas SDM dan Kelembagaan Pertanian Nasional.
- SS5. Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel.

Gambar 1
Peta Strategi Kementerian Pertanian Tahun 2020 - 2024



Adapun Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra Kementerian Pertanian 2020 – 2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan PPSDMP, sebagai berikut:

- SS3. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian, dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi.
- SS4. Meningkatnya Kualitas SDM dan Kelembagaan Pertanian Nasional, dengan IKSS Persentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya dan Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya.
- SS5. Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel, dengan IKSS Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dan Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian.

Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPSDMP kemudian diturunkan ke dalam Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BBPMKP tahun 2020-2024, dengan rincian sebagai berikut:

SS4. Meningkatnya Kualitas SDM dan Kelembagaan Pertanian Nasional, dengan IKSS Persentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya dan Tingkat Kepuasan Peserta Pelatihan terhadap Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian.

SS5. Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel, dengan IKSS Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dan Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian.

Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPSDMP kemudian dijabarkan dalam Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yang ingin dicapai BPPSDMP untuk tahun 2020-2024, dengan rincian sebagai berikut:

SP1. Termanfaatkannya teknologi pertanian dengan indikator kinerja: Persentase petani yang menerapkan teknologi.

SP2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian nasional, dengan indikator kinerja Persentase sumber daya manusia pertanian yang meningkat kapasitasnya, dan Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di sektor pertanian.

SP3. Meningkatnya kualitas kelembagaan pertanian nasional, dengan indikator kinerja Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya.

SP4. Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, dengan indikator kinerja: Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPPSDMP.

SP5. Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas, dengan indikator kinerja: Nilai Kinerja Anggaran BPPSDMP.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan suatu sasaran strategis. Pada level 0 (menteri) disebut Indikator Kinerja Sasaran Strategis; level 1 (Eselon I) disebut Indikator Kinerja Sasaran Program; level 2 (Eselon II) disebut Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) adalah indikator yang digunakan sebagai acuan ukuran kinerja di BBPMKP selaku eselon II. Adapun tujuan penetapan Indikator Kinerja untuk: (1) menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT); (2) menyampaikan rencana kerja dan anggaran; (3) menyusun dokumen perjanjian kinerja; (4) menyusun laporan kinerja; dan (5) melakukan evaluasi SAKIP.

Mengacu pada Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BBPMKP tahun 2020-2024, maka berikut Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yang ingin dicapai BBPMKP untuk tahun 2020-2024:

- SP2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian nasional, dengan indikator kinerja:
 - Persentase sumber daya manusia pertanian yang meningkat kapasitasnya
 - Tingkat Kepuasan Peserta Pelatihan terhadap Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian
- SP4. Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, dengan indikator kinerja:
 - Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BBPMKP
- SP5. Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas, dengan indikator kinerja:
 - Nilai Kinerja Anggaran BPPSDMP

Adapun Program Utama Kementerian Pertanian untuk periode tahun 2020-2024, adalah:

1. Pengembangan Kostratani dan pembangunan SDM pertanian melalui pendidikan dan pelatihan vokasi;
2. Fasilitasi Pembiayaan, Infrastruktur, dan Alsintan;
3. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Berbasis Korporasi;
4. Pengembangan Kawasan Hortikultura Berdaya Saing;
5. Gerakan Peningkatan Produksi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Perkebunan;
6. Peningkatan populasi, produktivitas dan mutu genetik ternak potong/unggas;
7. Akselerasi pemanfaatan inovasi teknologi dan produksi benih/bibit;
8. Pengentasan daerah rentan rawan pangan (*family farming*, Pertanian Masuk Sekolah, diversifikasi pangan) serta distribusi dan pengendalian harga pangan pokok; serta
9. Penguatan layanan perkarantina dan akselerasi ekspor melalui program Gerakan Tiga Kali Lipat Ekspor.

BPPSDMP menetapkan 3 (tiga) Program Aksi BPPSDMP tahun 2020-2024 yang mendukung Program Utama Kementerian Pertanian sekaligus untuk mencapai sasaran jangka menengah tahun 2020-2024, yang terdiri dari:

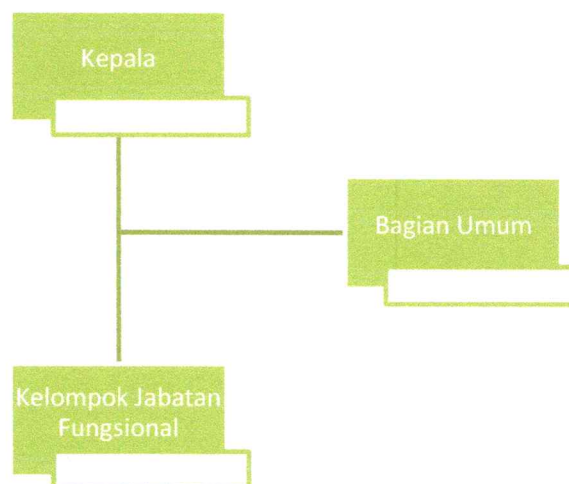
1. Gerakan Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani),
2. Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi mendukung Penumbuhan Pengusaha Pertanian Milenial, dan
3. Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi mendukung Program Utama Kementerian Pertanian.

BBPMKP sebagai salah satu UPT Pelatihan di bawah BPPSDMP turut mendukung ketiga Program Aksi BPPSDMP yang telah ditetapkan tersebut.

2. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, BBPMKP mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

Gambar 2
Struktur Organisasi BBPMKP



BBPMKP terdiri atas Bagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, keuangan, rumah tangga, dan penatausahaan barang milik negara, sedangkan Kelompok Jabatan Fungsional memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Kepala BBPMKP

menetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Lembaga.

3. KERAGAAN ORGANISASI

Sebelum mengalami perubahan nomenklatur menjadi BBPMKP, keragaan organisasi dalam pencapaian kinerja BBPMKP pada tahun 2015-2019 dilaksanakan melalui lima pilar Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian yaitu: (1) Kelembagaan Pelatihan Pertanian; (2) Ketenagaan Pelatihan; (3) Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian; (4) Standarisasi dan Sertifikasi Kompetensi SDM Pertanian; dan (5) Program dan Kerjasama Pelatihan. Capaian kinerja Pemantapan Sistem Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian pada periode tahun 2015-2019 tercermin pada keragaan berikut ini:

2.3.1. Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian

Output kegiatan pelatihan bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam mendukung program peningkatan produksi dan produktivitas komoditas strategis pertanian dan reformasi birokrasi, yakni telah dilatih sejumlah 7.476 orang dari 7.673 orang yang ditargetkan. Rata-rata realisasi output pelatihan adalah 98.14 persen. Secara rinci per tahun terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Target dan Realisasi Output Pelatihan Pertanian di BBPMKP Tahun 2015-2019

Tahun	Target	Realisasi	Persentase Realisasi
2015	2.620	2.454	93.66%
2016	1.455	1.438	98.83%
2017	786	772	98.22%
2018	1.411	1.411	100%
2019	1.401	1.401	100%
TOTAL	7.673	7.476	98.14%

Sumber: Data LAKIN BBPMKP Tahun 2015-2019 diolah.

2.3.2. Dinamika Sumber Daya Manusia Kediklatan

Keberhasilan kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian tahun 2015- 2019 ditopang oleh SDM handal. Namun seiring banyaknya pegawai yang memasuki masa purnabhakti dan terbatasnya jumlah penerimaan Calon

Pegawai Negeri Sipil maka jumlahnya semakin berkurang yang dapat mengakibatkan penurunan produktivitas pelatihan pertanian-.

Adapun dinamika SDM pelatihan di BBPMKP tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Jumlah SDM Kediklatan di BBPMKP Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah SDM Kediklatan
2015	198
2016	192
2017	170
2018	159
2019	154

Sumber: Data SIMPEG dan SIMASN BBPMKP Tahun 2015-2019 diolah.

2.3.3. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kediklatan

Dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan pelatihan, BBPMKP telah mengikutsertakan Widyaiswara dan tenaga pelatihan lainnya dalam kegiatan pengembangan profesionalisme dan peningkatan kompetensi. Adapun data mengenai peningkatan kompetensi tenaga pelatihan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4
Jumlah Tenaga Pelatihan yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kompetensi di BBPMKP Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah
2015	5
2016	153
2017	30
2018	172
2019	87

Sumber: Data Kepegawaian dan Tata Usaha BBPMKP Tahun 2015-2019 diolah.

2.3.4. Penumbuhan dan Penguatan P4S

Penumbuhan dan penguatan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya atau lebih dikenal dengan Pusat Pelatihan Pertanian Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) pada tahun 2015-2019 binaan BBPMKP dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5
Penumbuhan dan Penguatan P4S Binaan BBPMKP Tahun 2015-2019

Tahun	Wilayah Binaan	Jumlah P4S Existing	Jumlah P4S Penumbuhan	Total
2015	Jawa Barat dan Banten	33	15	48
2016	Jawa Barat dan Banten	48		48
2017	Jawa Barat dan Banten	46		46
2018	Jawa Barat dan Banten	33		33
2019	Jawa Tengah dan DKI Jakarta	101	-	101

Sumber: Data Program dan Kerjasama BBPMKP Tahun 2015-2019 diolah

2.3.5. Kerjasama Pelatihan dan Magang

Untuk meningkatkan jejaring kerjasama pelatihan dan meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional, telah terjalin kerjasama dalam negeri (Kementerian/Lembaga) dan luar negeri. Secara riil bentuk kerjasama ini diwujudkan dengan kerjasama pelatihan/permagangan dan kegiatan lainnya. BBPMKP turut berperan dalam kegiatan permagangan bagi petani muda Indonesia dengan Jepang yang sudah dilakukan semenjak tahun 1984. Adapun data realisasi kerjasama pelatihan/magang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6
Realisasi Kerjasama Pelatihan/Magang di BBPMKP Tahun 2015-2019

Tahun	Kerjasama Pelatihan/Magang	Kerjasama Lainnya	Total
2015	56	530	586
2016	3	260	263
2017	4	178	182
2018	30	67	97
2019	30	195	225

Sumber: Data Program dan Kerjasama BBPMKP Tahun 2015-2019 diolah.

2.3.6. Pendanaan dan Realisasi

Jumlah anggaran Kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian tahun 2015-2019 mencapai Rp. 184,444,855,912,- (seratus delapan puluh empat milyar empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus dua belas rupiah) dengan capaian kinerja anggaran sebesar Rp 180,326,768,002,- (seratus delapan puluh milyar tiga ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu dua rupiah) dengan rata-rata realisasi sebesar 97.61 persen, seperti terlihat pada tabel 8 berikut:

Tabel 7
Target dan Realisasi Anggaran BBPMKP Tahun 2015-2019

TAHUN	PAGU	REALISASI	%
2015	36.309.869.000	35.122.917.256	96,73
2016	39.617.953.000	36.656.660.378	92,53
2017	24.891.587.000	24.830.417.368	99.75
2018	40.087.867.793	40.106.467.000	99.22
2019	43.537.579.119	43.610.306.000	99.83
TOTAL	184,444,855,912	180,326,768,002	97.61

Sumber: Data LAKIN BBPMKP Tahun 2015-2019 diolah.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Lingkungan strategis telah mengalami perubahan yang begitu cepat, termasuk di sektor pertanian. Dampaknya adalah perubahan tuntutan dan kebutuhan *stakeholders* terhadap SDM pertanian yang berkualitas. Hal tersebut berdampak langsung pada kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM, misalnya melalui pelatihan/magang. Tantangan ini harus dijawab oleh BBPMKP selaku lembaga pelatihan bagi aparatur dan non aparatur di bidang pertanian.

Dalam rangka mengemban tugas untuk mengembangkan kompetensi SDM pertanian, perlu dilakukan analisa kondisi internal dan eksternal di lingkup BBPMKP yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan program kerja BBPMKP tahun 2020-2024.

3.1. Identifikasi Lingkungan Strategis BBPMKP

3.1.1. Internal

a. Kekuatan (*Strength*), meliputi:

1. Mempunyai landasan hukum dalam pelaksanaan kegiatan, yaitu:
 - a) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
 - b) Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 279/Kpts/OT.050/M/06/2023 Tentang Kelompok Substansi Dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
 - c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian;
 - d) Peraturan Permentan Nomor 37/PERMENTAN/SM.120/8/2018 tentang Pedoman Pelatihan Pertanian.
2. Tersedianya SDM yang memadai (dengan jumlah 125 orang pegawai PNS dan 75 orang Tenaga Harian Lepas);

3. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (Pejabat Struktural) yang telah memiliki Sertifikat *Management of Training* (MOT);
4. Tersedianya Pengelola Pelatihan (staf) yang telah memiliki Sertifikat *Training Officer Course* (TOC);
5. Tersedianya Tenaga Pengajar/Widyaiswara yang kompeten di bidangnya;
6. Tenaga Pengajar/Widyaiswara yang telah memiliki Sertifikat *Training of Facilitator* (TOF) Diklat Kepemimpinan dan TOF Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), juga sertifikat keahlian lainnya sesuai kompetensi yang dipersyaratkan;
7. Mempunyai pelatihan unggulan yang telah terakreditasi, seperti:
 - a) Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (Akreditasi A dari LAN);
 - b) Pelatihan Kepemimpinan Administrator (Akreditasi A dari LAN);
 - c) Pelatihan Dasar CPNS (Akreditasi A dari LAN);
 - d) Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II (Akreditasi B dari LAN);
 - e) Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar (Akreditasi B dari LKPP).
8. Memiliki *core business* yang prospektif, yakni pelatihan manajerial dan kepemimpinan pertanian;
9. Letak geografis BBPMKP yang strategis, mudah terjangkau, didukung dengan kondisi dan lingkungan alam yang nyaman;
10. Tersedianya prasarana dan sarana pelatihan yang memadai (bangunan kantor, asrama, kelas, sarana diklat lainnya);
11. Tersedianya lahan yang luas untuk penyelenggaraan pelatihan *outdoor* seperti *capacity building/outbound*;
12. Perpustakaan yang sudah terakreditasi A dari Perpustakaan Nasional RI;
13. Tsertifikasi SNI ISO 9001:2015 – *Quality Management System*;
14. Tsertifikasi SNI ISO 21001:2018 – *Educational Organization Management System*;
15. Tsertifikasi SNI ISO 37001:2016 – *Anti – Bribery Management System*;
16. Jejaring kerjasama (*networking*) yang baik dalam menyelenggarakan pelatihan dengan berbagai Kementerian/Lembaga lainnya;
17. Tersedianya dana pengembangan Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian non aparatur.

b. Kelemahan (*Weakenesses*), meliputi:

1. Belum ada akses hasil-hasil *assessment* yang dilakukan oleh Biro Organisasi dan Kepegawaian, Sekretariat Jenderal sebagai bahan untuk melaksanakan pengembangan kompetensi ASN lingkup Kementerian Pertanian;
2. Keterbatasan peralatan multimedia (*drone*, studio *e-learning*, *server*, AOR);
3. Keterbatasan SDM dalam menguasai Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) (SIM *drone*, aplikasi GIS, *database*, admin);
4. Sarana dan prasarana yang tidak *up to date*;
5. Belum seluruhnya staf tanggap dalam pelayanan;
6. Sebagian besar SDM belum mampu berkomunikasi bahasa asing;
7. Belum adanya kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).

3.1.2. Eksternal

a. Peluang (*Opportunities*), meliputi:

1. Peluang untuk menjadi Badan Layanan Umum (BLU);
2. Pengembangan laboratorium multimedia (radio, *e-learning*, TIK);
3. Permintaan *outbound* yang tinggi (*character building*);
4. Berlakunya Kartu Prakerja yang merupakan program Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Penyiapan SDM yang sesuai standar perusahaan (perusahaan bidang perkebunan);
6. Terbukanya jejaring pelatihan bertaraf internasional (COMCEC, APO, JICA);
7. Komitmen pembangunan berkelanjutan melalui pembangunan rendah karbon atau *Low Carbon Development Indonesia* (LCDI) yang mengarah pada *green economy*;
8. Meningkatnya permintaan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas (ruang kelas, asrama, aula).

b. Tantangan (*Threats*), meliputi:

1. Terdapat lembaga pelatihan yang menyediakan pelatihan sejenis (kepemimpinan, manajemen, multimedia);
2. Terdapat pelatihan sejenis yang bersifat sosial untuk *job seeker/job*

3.2. Analisa SWOT

Adapun hasil analisa *Strength*, *Weakness*, *Opportunity* dan *Threads* bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8
Analisa SWOT

FAKTOR-FAKTOR INTERNAL		
STRENGTHS (+)	WEAKNESSES (-)	
Mempunyai landasan hukum dalam pelaksanaan kegiatan	Belum ada akses hasil-hasil <i>assessment</i>	
Tersedianya SDM yang memadai	Keterbatasan peralatan multimedia	
Tersedianya Penyelenggara Pelatihan yang tersertifikasi	Keterbatasan SDM dalam menguasai TIK	
Tersedianya Pengelola Pelatihan yang tersertifikasi	Sarana dan prasarana yang tidak <i>up to date</i>	
Tersedianya Tenaga Pengajar/Widyaiswara yang kompeten di bidangnya	Sikap penyelenggara dalam menolak gratifikasi masih tidak tegas	
Tenaga Pengajar/Widyaiswara yang tersertifikasi	Belum seluruhnya staf tanggap dalam pelayanan	
Mempunyai pelatihan unggulan yang telah terakreditasi	Masih adanya peserta yang merokok di lingkungan asrama	
Memiliki <i>core business</i> yang prospektif	Sebagian besar SDM belum mampu berkomunikasi bahasa asing	
Letak geografis BBPMKP yang strategis, mudah terjangkau, didukung dengan kondisi dan lingkungan alam yang nyaman	Belum adanya kerjasama dengan DUDI	

	FAKTOR-FAKTOR INTERNAL	
	STRENGTHS (+)	WEAKNESSES (-)
	Tersedianya prasarana dan sarana diklat yang memadai	
	Tersedianya lahan yang luas untuk penyelenggaraan pelatihan outdoor	
	Perpustakaan yang sudah terakreditasi A	
	Tersertifikasi SNI ISO 9001:2015	
	Jejaring kerjasama (<i>networking</i>) yang baik	
	Tersedianya dana pengembangan P4S	

FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL		
<i>OPPORTUNITIES (+)</i>		<i>STRENGTHS (+) / OPPORTUNITIES (+) STRATEGY</i>
Peluang untuk menjadi BLU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan langkah strategis dan proposal menuju BLU 2. Konsultasi dan koordinasi dengan pihak Kementerian Keuangan 3. Konsultasi dan koordinasi dengan Sekretariat Jenderal terkait BLU 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas SDM
	<i>Benchmarking</i> ke lembaga pelatihan yang sudah menjadi BLU	
Pengembangan laboratorium multimedia	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Benchmarking</i> ke laboratorium multimedia 2. Konsultasi dan koordinasi ke pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan studio multimedia 2. <i>Up grading</i> kelengkapan sarana prasarana multimedia 3. Peningkatan kapasitas SDM dalam TIK
Permintaan <i>outbound</i> yang tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan <i>landscape outbound</i> 3. Promosi program pelatihan dan <i>outbound</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Pengembangan kapasitas ketenagaan pelatihan
Berlakunya Kartu Prakerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sinkronisasi program pelatihan dengan Kementerian/Lembaga terkait 2. Penyusunan program pelatihan berbasis kebutuhan ril pasar 2. Penyusunan dan penyempurnaan SKKNI terkait manajemen dan kepemimpinan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan kurikulum pelatihan berbasis kebutuhan ril pasar 5. Peningkatan kapasitas ketenagaan pelatihan

FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL		
OPPORTUNITIES (+)	STRENGTHS (+) / OPPORTUNITIES (+) STRATEGY	WEAKNESSES (-) / OPPORTUNITIES (+) STRATEGY
Penyiapan SDM yang sesuai standar perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga pelatihan dan sertifikasi, pendidikan dan perusahaan 2. Penyusunan dan penyempurnaan SKKNI terkait manajemen dan kepemimpinan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas ketenagaan pelatihan 2. Penyiapan sarana prasarana penunjang pelatihan
Terbukanya jejaring pelatihan bertaraf internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan lembaga pelatihan bertaraf internasional 2. Peningkatan jejaring kerjasama pelatihan yang lebih luas 3. Penyusunan profil lembaga dalam bahasa internasional 4. Penyusunan katalog penawaran kerjasama pelatihan dan sertifikasi 	Peningkatan kapasitas SDM dalam penguasaan bahasa internasional
Kebijakan pembangunan nasional berbasis <i>green economy</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan program pelatihan yang mendukung kebijakan <i>green economy</i> 2. Konsultasi dan koordinasi dengan pihak Bappenas selaku pembina 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan kurikulum pelatihan terkait <i>green economy</i> 2. Peningkatan kapasitas ketenagaan terkait program <i>green economy</i>
Peningkatan permintaan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Promosi terkait fasilitas sarana prasarana dan tarif PNB 2. Penerapan SOP yang konsisten 	Pemanfaatan PNB untuk <i>up grading</i> sarana prasarana

THREATS (-)	STRENGTHS (+) / THREATS (-) STRATEGY	WEAKNESSES (-) / THREATS (-) STRATEGY
Terdapat lembaga pelatihan sejenis	Peningkatan jejaring kerjasama pelatihan pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan ISO secara konsisten; 2. Penyempurnaan dan penerapan SOP 3. Peningkatan kapasitas ketenagaan pelatihan 4. Inovasi di bidang pelatihan
Terdapat pelatihan sejenis yang bersifat sosial	Peningkatan jejaring kerjasama pelatihan pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan kurikulum yang <i>up to date</i> 2. <i>Value added</i> bagi alumni peserta pelatihan
Generasi muda yang mulai meninggalkan dunia pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi profil petani muda guna mendorong minat generasi muda pada bidang pertanian 2. Peningkatan kapasitas petani/generasi muda melalui pelatihan/permagangan 	Pengembangan program <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) melalui pemberdayaan generasi muda dalam dunia pertanian
Memasuki era industri 4.0	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan desain dan pengembangan kurikulum pelatihan pertanian 4.0 berbasis kompetensi 2. Revitalisasi lembaga melalui perbaikan mutu dan sumber daya menuju pusat pelatihan vokasi yang unggul 3. <i>Rebranding</i> lembaga menjadi pusat pelatihan berbasis kebutuhan riil pasar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kompetensi SDM bidang TIK 2. Pengembangan metodologi pelatihan 3. Inovasi di bidang pelatihan

FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL		STRENGTHS (+) / THREATS (-) STRATEGY		WEAKNESSES (-) / THREATS (-) STRATEGY	
THREATS (-)					
Kapasitas pengelola P4S yang bervariasi		1. Sosialisasi Permentan Nomor 33 Tahun 2016 melalui kegiatan Forum Komunikasi P4S, Klasifikasi P4S serta monitoring dan evaluasi P4S 2. Pembinaan dan pengembangan P4S berbasis kelas P4S 3. Peningkatan kapasitas pengelola P4S		Standarisasi penilaian klasifikasi P4S	
Adanya lembaga pelatihan yang memiliki <i>performance</i> era industri 4.0		1. Peningkatan jejaring kerjasama pelatihan pertanian 2. Benchmarking ke lembaga pelatihan yang memiliki <i>performance</i> era industri 4.0 3. Digitalisasi pelatihan pertanian		1. Peningkatan kompetensi SDM bidang TIK 2. Pengembangan metode pelatihan 3. Inovasi di bidang pelatihan	
Kualitas kelembagaan tani yang bervariasi		Peningkatan kapasitas petani dalam manajemen kelembagaan tani		1. Penyusunan kurikulum pelatihan yang selaras dengan program Kementerian Pertanian 2. Penyusunan klasifikasi kelembagaan tani	
Adanya <i>gap</i> antara alumni peserta pelatihan dengan DUDI		Pengembangan jejaring kerjasama pelatihan lintas sektor dan dunia usaha/industri (MoU)		Penyusunan kurikulum pelatihan berbasis SKKNI	
Adanya kebutuhan <i>single data</i>		Pengembangan <i>Knowledge Management System</i>		1. Peningkatan kapasitas SDM pengelola data 2. Komitmen manajemen terhadap ketersediaan data yang akurat, konsisten dan terpercaya	

FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL			
THREATS (-)		STRENGTHS (+) / THREATS (-) STRATEGY	WEAKNESSES (-) / THREATS (-) STRATEGY
Adanya perampingan birokrasi	<div>1. Konsultasi dan koordinasi ke Sekretariat Jenderal terkait kebutuhan pelatihan yang disebabkan alih fungsi pejabat struktural menjadi fungsional</div> <div>2. Penyiapan ketenagaan pelatihan terkait Reformasi Birokrasi</div>	<div>1. Sosialisasi Reformasi Birokrasi</div> <div>2. Penataan ulang tugas, fungsi dan peran ASN</div> <div>3. Perbaikan manajerial yang berorientasi kepada pelayanan</div>	
Adanya <i>pandemic corona virus disease</i> 19 (Covid-19)	<div>1. Melakukan perubahan metode pelatihan</div> <div>2. Pemasaran produk secara digital (penggunaan media social dan website)</div>	<div>1. Peningkatan kapasitas SDM</div> <div>2. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung (multimedia)</div> <div>3. Peningkatan pelayananan berbasis teknologi digital</div>	

3.3. Arah Kebijakan

3.3.1. Arah Kebijakan Kementerian Pertanian

Pembangunan pertanian dan pangan diarahkan dalam mewujudkan Pertanian Maju, Mandiri dan Modern untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan petani sesuai visi Kementerian Pertanian “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Pertanian maju bisa diartikan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian yang mampu meningkatnya produktivitas kerja dan kesejahteraannya. Apabila ditinjau dari indikator ekonomi, dicirikan dengan kestabilan lembaga dan pranata pertanian dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menyumbang penciptaan/penyerapan tenaga kerja. Pertanian maju juga ditandai dengan peran serta masyarakat secara nyata dan efektif dalam pembangunan pertanian.

Pertanian mandiri bisa diartikan bahwa dalam pembangunan pertanian berdasarkan kemampuan dalam negeri sesuai dengan kondisi masyarakat. Pertanian mandiri diindikasikan dengan memiliki kemampuan ilmu pengetahuan dalam pengelolaan sumber daya pertanian, memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dalam memenuhi kebutuhan pembangunan pertanian, mampu mendorong tumbuhnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang maju dan memiliki kemampuan mendorong tumbuhnya kreativitas untuk selalu aktif dan bekerjasama dengan pihak lain.

Pertanian modern diartikan bahwa pembangunan pertanian berbasiskan inovasi yang sejalan dengan revolusi industri 4.0 sehingga pertanian modern yang dikembangkan memiliki karakteristik: memproduksi sesuai kebutuhan, bernilai ekonomi tinggi, produktivitas tinggi serta bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Pertanian yang maju, mandiri dan modern dapat terwujud apabila para petani dan kelembagaan petani serta pemangku kepentingan lainnya siap untuk dapat melaksanakan implementasi amanah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yaitu dengan memberdayakan petani dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi dan daya saing. Prinsip dan penerapan perlindungan dan pemberdayaan petani juga dilakukan dalam pembangunan kawasan pertanian berbasis korporasi petani,

sehingga diharapkan pendekatan ini mampu mempercepat terwujudnya transformasi petani untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan petani.

Pembangunan sektor pertanian diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan, dengan agenda pembangunan sebagai berikut:

- a. Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
- b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
- d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
- g. Memperkuat Stabilitas Politik Hukum Pertahanan Dan Keamanan (Polhukhankam) serta Transformasi Pelayanan Publik.

Berdasarkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional tersebut, Kementerian Pertanian fokus dalam mendukung dua Prioritas Nasional (PN) yaitu:

- PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
- PN 3. Mengembangkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Sektor pertanian pada umumnya menjadi tumpuan penghidupan mayoritas tenaga kerja miskin dan pada dekade ini menunjukkan kontribusi terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) yang cenderung menurun. Data Susenas 2018, menunjukkan bahwa sebanyak 49,8% kepala keluarga dari kelompok miskin dan rentan bekerja di sektor pertanian, dibandingkan dengan yang bekerja di sektor perdagangan dan jasa sebanyak 13,4%. Rata-rata pendapatan sektor pertanian sebesar Rp. 743.399,- per bulan dan sektor perdagangan dan jasa akomodasi sebesar Rp. 1.218.955,- per bulan (Sakernas, 2017).

Rendahnya pendapatan tersebut berkaitan erat dengan produktivitas yang rendah, minimnya kepemilikan aset produktif dan terbatasnya akses terhadap lembaga pembiayaan. Salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas manusia

dilakukan melalui pendampingan pada berbagai program pembangunan pertanian, seperti melalui peningkatan peran penyuluh pertanian, konsultan pertanian dan fasilitator lapangan.

RPJMN Tahun 2020-2024 mengamanahkan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Kebijakan pembangunan manusia tersebut dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup, dan inklusif termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas, dan pengelolaan SDM bertalenta. Selain itu, peningkatan sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi masih perlu difokuskan, diintegrasikan, dan didayagunakan untuk mengatasi dua tantangan utama, yaitu penciptaan inovasi.

Program Prioritas (PP) pada PN3 yang terkait dengan Kementerian Pertanian yaitu PP 7 Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing dengan indikator yaitu: (1) Peningkatan persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapat pekerjaan; (2) Peningkatan jumlah lulusan pelatihan vokasi; (3) Peningkatan jumlah publikasi ilmiah nasional dan internasional; (4) Peningkatan indeks peneliti; (5) Jumlah hak kekayaan intelektual dari hasil penelitian dan pengembangan; (6) Jumlah produk inovasi yang dimanfaatkan masyarakat dan industri/badan usaha; (7) jumlah produk inovasidari tenant perusahaan pemula berbasis teknologi yang dibina.

Dari agenda pembangunan nasional, Kementerian Pertanian lebih difokuskan dalam mendukung agenda pembangunan Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

RPJMN tahun 2020-2024 telah menetapkan Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) Nasional yaitu proyek terintegrasi yang disusun untuk membuat RPJMN lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat. Dari 41 *Major Project* di RPJMN, Kementerian Pertanian mendukung pada tiga *Major Project* yaitu: (1) Penguatan jaminan usaha serta 350 korporasi petani dan nelayan; (2) Pembangunan Energi Terbarukan *Green Fuel* Berbasis Kelapa Sawit; (3) Wilayah

Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay, dan (4) Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/ *Food Estate*.

RPJMN 2020-2024 juga telah menetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif. Keempat *mainstreaming* ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan pertanian. Pengarusutamaan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan, dimana antara satu pengarusutamaan dengan yang lainnya saling terkait dan saling mendukung. Kementerian Pertanian sebagai bagian dari pendukung pembangunan nasional juga berkewajiban melaksanakan pengarusutamaan tujuan pembangunan berkelanjutan. Kemiskinan, kelaparan dan malnutrisi di perdesaan berhubungan dengan pertanian, bahkan pertanian diharapkan menjadi sektor unggulan dalam pengentasan kelaparan dengan peningkatan akses pangan masyarakat. Sektor pertanian memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap pencapaian target dan tujuan. Program *Sustainable Development Goals* (SDG's) yakni untuk kesejahteraan manusia yakni memberantas kemiskinan dan kelaparan. *No Poverty dan Zero Hunger*. Keseimbangan pembangunan infrastruktur desa kota, agroindustri pedesaan berdampak besar bagi pengentasan kemiskinan. Kebijakan-kebijakan yang pro rakyat seperti Harga Eceran Tertinggi (HET), Asuransi pertanian, kemudahan akses bank, hingga penguatan kelembagaan dengan korporasi petani merupakan upaya dalam mewujudkan tujuan SDG's yang meningkatkan kesejahteraan petani.

BPPSDMP mendukung *major project* Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan melalui kegiatan penguatan kelembagaan petani. *Major Project* Korporasi Petani dilatarbelakangi oleh belum terbentuknya *business model* korporasi petani dan nelayan dengan skala usaha ekonomi yang menerapkan konsep *society* 5.0. Selain itu, belum terintegrasinya 1.029 klaster komoditas pertanian basis produksi pertanian dengan akses pasar. Sasaran manfaat dari proyek ini adalah meningkatnya pendapatan petani rata-rata 5% per tahun, meningkatnya produktivitas komoditas pertanian 5%, nilai tambah per tenaga kerja pertanian Rp.59,80 juta/tenaga kerja pada tahun 2024.

3.3.2. Arah Kebijakan BPPSDMP

Memperhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN tahun 2020-2024 dan arahan Presiden, kebijakan pertanian dalam periode tahun 2020-2024 diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi termasuk memperhatikan kesejahteraan keluarga petani dan keberlanjutan sumber daya pertanian. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka Kementerian Pertanian menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Terjaganya ketahanan pangan nasional;
- b. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian;
- c. Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian;
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian (SDM); dan
- e. Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima;
- f. Peningkatan produktivitas dan efisiensi pertanian menuju pertanian berkelanjutan;
- g. Pengembangan *Food Estate*.

Mengacu pada arah kebijakan umum sebagaimana tertuang dalam RPJMN dan arah kebijakan Pembangunan Pertanian, maka arah kebijakan pembangunan SDM pertanian tahun 2020-2024 adalah:

- a. Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi pertanian;
- b. Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian;
- b. Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian; dan
- c. Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi BPPSDMP yang efektif dan efisien.

Dalam mendukung arah kebijakan pembangunan SDM pertanian, maka fokus Badan PPSDMP dalam upaya pencapaian target pembangunan pertanian adalah dengan meningkatkan efektivitas penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian melalui penguatan Balai Pelatihan Pertanian (BPP) berbasis teknologi informasi, yang mengintegrasikan komponen gerakan secara optimal meliputi pelaku utama, pelaku usaha, penyuluh pertanian dalam arti luas, petugas teknis pertanian, dan pemangku kepentingan lainnya, serta tenaga kerja sektor pertanian yang berdaya saing dan berjiwa wirausaha yang tinggi melalui kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian.

Arah kebijakan tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui strategi yang memuat langkah-langkah sebagai dasar menentukan program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan BPPSDMP dalam periode tahun 2020-2024.

3.3.3. Arah Kebijakan BBPMKP

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan SDM pertanian tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan oleh BPPSDMP, maka BBPMKP menyusun arah kebijakan tahun 2020-2024 sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian;
- b. Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi yang efektif dan efisien.

3.4. Strategi

3.4.1. Strategi Kementerian Pertanian

Strategi Kementerian Pertanian merupakan penjabaran dari arah kebijakan yang telah ditentukan yang memuat langkah-langkah sebagai dasar menentukan program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 2020-2024. Strategi yang dipilih untuk diterapkan diharapkan berdampak besar terhadap pencapaian visi dan misi, tujuan serta sasaran strategis. Untuk mencapai Visi dan Misi, Strategi Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut:

- a. Strategi untuk Menjaga Ketahanan Pangan Nasional;
- b. Strategi dalam Menjaga Keberlanjutan Sumber Daya Pertanian serta Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian;
- c. Strategi dalam Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian;
- d. Strategi dalam Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian;
- e. Strategi dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional; dan
- f. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah yang Berorientasi pada Layanan Prima.

Kementerian Pertanian telah merumuskan pendekatan strategi dalam melaksanakan program/kegiatan untuk menjamin ketersediaan pangan dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing dalam kondisi pandemi, yang dirumuskan dalam lima Cara Bertindak (CB), yang meliputi: (1) Peningkatan kapasitas produksi, (2) Diversifikasi pangan lokal, (3) Penguatan cadangan dan sistem logistik pangan, (4) Pengembangan pertanian modern, dan (5) Gerakan Tiga

Kali Ekspor (Gratieks).

Gambar 3
Cara Bertindak (CB) Kementerian Pertanian



3.4.2. Strategi BPPSDMP

Mengacu pada strategi dan cara bertindak Kementerian Pertanian, strategi yang didelegasikan kepada BPPSDMP adalah: (1) Strategi dalam Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian, (2) Strategi dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pertanian, dan (3) Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah yang Berorientasi pada Layanan Prima. Rincian strategi dan Langkah operasional diuraikan sebagai berikut:

1. Strategi dalam Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian
Teknologi dan Inovasi pertanian menjadi faktor utama peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian, sampai saat ini kelembagaan penelitian dan pengembangan pertanian telah menghasilkan berbagai teknologi dan inovasi yang perlu didiseminasikan kepada petani melalui:
 - a. Pengawasan dan pendampingan diseminasi teknologi di Balai Penyuluhan Pertanian;
 - b. Penderasan diseminasi inovasi teknologi tepat guna di BPP Kostratani;
 - c. Pengawasan dan pendampingan diseminasi inovasi teknologi tepat guna;
 - d. Diseminasi pemanfaatan pertanian presisi di BPP;
 - e. Penguatan BPP berbasis teknologi informasi;

- f. Insentif kinerja Penyuluh Pertanian dalam pengawalan dan;
 - g. pendampingan diseminasi inovasi teknologi.
2. Strategi dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional
- Pengembangan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas diperlukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan pertanian berkelanjutan. SDM yang andal dan profesional menjadi salah satu faktor kunci dalam membangun pertanian berdaya saing tinggi dan berkelanjutan. Adapun strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pertanian adalah sebagai berikut:
- a. Pengembangan pelatihan teknis dan vokasi, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian dengan langkah operasional sebagai berikut:
 - Pengembangan kurikulum berbasis SKKNI/SKK;
 - Penguatan sistem sertifikasi kompetensi;
 - Penerapan sistem pelatihan berbasis kompetensi dan minat atau talenta;
 - Pelatihan peningkatan literasi bagi petani menuju era pertanian digital dan presisi;
 - Peningkatan kapasitas SDM secara masif, melalui pelatihan dan bimtek dengan metode online dan offline berbasis NIK;
 - Peningkatan profesionalisme dan kompetensi Widyaiswara dan tenaga pelatihan;
 - Pengembangan lembaga pelatihan pertanian sebagai pusat pelatihan dengan taraf internasional;
 - Standardisasi mutu pelayanan pelatihan dengan penerapan ISO;
 - Peningkatan sarana dan prasarana pelatihan pertanian untuk menghasilkan mutu SDM sesuai standar yang ditentukan;
 - Peningkatan kapasitas lembaga sertifikasi profesi pertanian;
 - Penguatan jejaring dan kerjasama pelatihan dengan dunia usaha/dunia industri;
 - Pelatihan literasi keuangan dan akses KUR serta asuransi pertanian bagi petani;
 - Peningkatan kapasitas pemuda tani melalui P4S;
 - Pelatihan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
 - Pelatihan mendukung Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan.

- b. Regenerasi dan Penumbuhan Minat Generasi Muda Pertanian dengan langkah operasional sebagai berikut:
- Penumbuhan wirausahawan muda pertanian;
 - Pendampingan mahasiswa, siswa, alumni, pemuda tani di Kawasan pertanian;
 - Penumbuhan kelompok usaha bersama (KUB) yang dikelola oleh pemuda tani;
 - Permagangan bagi pemuda tani dalam bidang pertanian;
 - Pengembangan jejaring kerjasama antar pengusaha pertanian milenial.
 - Pendampingan bagi petani milenial dalam literasi keuangan dan akses KUR serta asuransi pertanian
 - Peningkatan branding bagi petani melalui pengukuhan Duta Petani Milenial/Andalan (DPM/DPA)
 - Peningkatan resiliensi petani milenial melalui jejaring usaha petani milenial.
- c. Penyuluhan pertanian berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan langkah operasional sebagai berikut:
- Penyeberluasan informasi pertanian melalui media elektronik, media cetak dan e-learning;
 - Pengembangan database kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan yang terintegrasi;
 - Pengembangan database petani berbasis Nomor Induk Kependudukan;
 - Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi Balai Penyuluhan Pertanian;
 - Pengawasan dan pendampingan pada petani dalam literasi keuangan dan akses KUR serta asuransi pertanian;
 - Pengawasan dan pendampingan petani dalam menerapkan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
 - Pengawasan dan pendampingan mendukung Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan.
- d. Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi berbasis Kompetensi dengan langkah operasional sebagai berikut:
- Transformasi pendidikan menengah pertanian menjadi lembaga pendidikan vokasi yang profesional, mandiri dan berdaya saing;

- Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan untuk menghasilkan lulusan yang menjadi wirausaha pertanian dan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri;
 - Pengembangan kurikulum yang link and match dengan kebutuhan Dunia Usaha/Dunia Industri;
 - Permagangan bagi lulusan pendidikan vokasi pertanian;
 - Pengembangan jejaring kerjasama pendidikan vokasi pertanian.
- e. Penguatan kelembagaan petani berbasis korporasi dengan langkah operasional sebagai berikut:
- Penumbuhan dan pengembangan poktan dan gapoktan;
 - Penumbuhan dan pengembangan KEP/BUMP/ Kelompok Usaha Bersama (KUB) melalui jejaring dan kemitraan usaha;
 - Penumbuhan dan pengembangan korporasi petani;
 - Insentif kinerja Penyuluh Pertanian dalam pengawalan dan pendampingan peningkatan kapasitas kelembagaan petani;
 - Pengawalan dan pendampingan bagi petani di kawasan pertanian berbasis korporasi dan food estate/KSPP;
 - Pendampingan bagi petani milenial di kawasan pertanian berbasis korporasi dan food estate/KSPP;
 - Pelatihan bagi SDM di kawasan pertanian berbasis korporasi dan food estate/KSPP.
- f. Komando Strategis Pembangunan Pertanian;
- Kolaborasi Strategis Pembangunan Pertanian adalah gerakan pembaharuan pembangunan pertanian nasional berbasis teknologi informasi untuk menyelaraskan kebijakan dengan semua pemangku kepentingan sehingga tercipta kesamaan arah atau satu komando. Gerakan pembaharuan pembangunan pertanian ini bertujuan mensinergikan semua pemangku kepentingan (stakeholder) pertanian dengan strategi kolaborasi berupa gerakan satu komando secara berjenjang mulai dari Pusat hingga ke kecamatan.
- Secara operasional, gerakan secara masif dilaksanakan di tingkat kecamatan melalui optimalisasi tugas, fungsi dan peran Balai Penyuluh Pertanian (BPP) yang dilengkapi dengan perangkat dan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai instrumen dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan pertanian untuk

mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Peran tersebut meliputi: 1) Pusat data dan informasi pertanian, yang mencakup data statistik pertanian dan sumber daya manusia pertanian; 2) Pusat gerakan pembangunan pertanian dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi untuk mensinergikan program strategis pembangunan pertanian dan pangan; 3) Pusat pembelajaran sebagai wadah dan wahana untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian, melalui proses belajar mengajar, dalam bentuk bimbingan teknis, percontohan (Sekolah Lapangan/Demplot/ Demfarm/Demarea); 4) Pusat konsultasi agribisnis antara pelaku utama dan pelaku usaha dengan melibatkan instansi/lembaga lain; dan 5) Pusat pengembangan jejaring kemitraan sebagai tempat pengembangan kemitraan usaha pelaku utama dan pelaku usaha dengan pihak lain.

Salah satu tujuan dari gerakan komando strategis di kecamatan yaitu terjaminnya pemutakhiran dan arus data pembangunan pertanian dari kecamatan sampai Pusat. Hal ini sangat penting dalam rangka mendukung program Satu Data Indonesia. Kementerian Pertanian telah menetapkan kebijakan Satu Data Pertanian dengan didukung oleh stakeholder terkait yang dikelola secara terbuka dan real time. Dashboard besar satu data sebagai sarana komunikasi dan informasi di tingkat nasional dibangun oleh Kementerian Pertanian sebagai pusat komando dalam pelaksanaan pengumpulan data dan informasi pembangunan pertanian dan pangan.

g. Pengarusutamaan Gender (PUG)

PUG merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Tujuan dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan untuk memanfaatkan sumber daya atau sumber modal serta merasakan hasil dari pembangunan bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki. RPJMN 2020-2024 telah menetapkan indikator yang digunakan untuk melihat implementasi PUG yaitu: (1) Indeks Pembangunan Gender (IPG); (2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG); dan (3) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Untuk mengoptimalkan implementasi PUG, Kementerian Pertanian telah menetapkan kebijakan PUG ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi

dari seluruh kebijakan dan program pembangunan pertanian.

Strategi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian terkait pengarusutamaan gender yaitu : (1) mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya pertanian; (2) berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta dalam memperoleh manfaat dari pembangunan; (3) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan, koordinasi dalam pelaksanaan PUG, baik pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) maupun penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender; (4) penyediaan dan pemanfaatan data terpilah sebagai dasar untuk melakukan pemetaan dalam rangka mengevaluasi perwujudan kesetaraan dan keadilan gender serta sarana dan prasarana yang responsif gender; (5) pengembangan inovasi untuk memudahkan pelaksanaan PUG.

Selain strategi dan kebijakan PUG dalam aspek perencanaan dan penganggaran, penandaan (*tagging*) anggaran kegiatan yang berbasis gender juga diterapkan dalam kegiatan penerapan pengendalian hama terpadu, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi pertanian, optimalisasi lahan, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pengembangan inovasi teknologi pertanian, pelatihan teknis budidaya, kajian gender dalam implementasi asuransi pertanian.

3. Strategi mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah yang Berorientasi pada Layanan Prima
 - a. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui upaya-upaya sebagai berikut:
 - Penerapan manajemen talenta ASN;
 - Peningkatan sistem merit ASN;
 - Penyederhanaan eselonisasi;
 - Penataan jabatan fungsional;
 - b. Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui:
 - Penataan kelembagaan instansi pemerintah;
 - Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi.

- c. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui:
 - Perluasan implementasi sistem integritas;
 - Penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi;
 - Reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.
- d. Transformasi pelayanan publik, melalui:
 - Pelayanan publik berbasis elektronik (e-service);
 - Penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik;
 - Penguatan ekosistem inovasi;
 - Penguatan pelayanan terpadu.

3.4.3. Strategi BBPMKP

Strategi utama BBPMKP merupakan turunan dari strategi utama BPPSDMP dan Pusat Pelatihan Pertanian. Strategi utama BBPMKP tahun 2020-2024 meliputi: (1) Strategi dalam Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian, (2) Strategi dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pertanian, dan (3) Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah yang Berorientasi pada Layanan Prima. Adapun rincian strategi dan langkah-langkah operasionalnya sebagai berikut:

1. Strategi dalam Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian
 - a. Supervisi dan pendampingan dalam kegiatan peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi BPP binaan BBPMKP untuk dimanfaatkan sebagai *Agricultural Operational Room* (AOR);
 - b. Penyeberluasan informasi pertanian melalui media elektronik, media cetak dan e-learning.
2. Strategi dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional
 - a. Pengembangan pelatihan teknis dan vokasi, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian dengan langkah operasional sebagai berikut:
 - Pengembangan kurikulum berbasis SKKNI/SKK;
 - Penguatan sistem sertifikasi kompetensi;
 - Penerapan sistem pelatihan berbasis kompetensi dan minat atau talenta;
 - Pelatihan peningkatan literasi bagi petani menuju era pertanian digital dan presisi;

- Peningkatan kapasitas SDM secara masif, melalui pelatihan dan bimtek dengan metode online dan offline berbasis NIK;
 - Peningkatan profesionalisme dan kompetensi Widyaiswara dan tenaga pelatihan;
 - Pengembangan lembaga pelatihan pertanian sebagai pusat pelatihan dengan taraf internasional;
 - Mengembangkan program pelatihan dan jejaring kerjasama pelatihan pertanian dalam dan luar negeri;
 - Standardisasi mutu pelayanan pelatihan dengan penerapan ISO dan akreditasi;
 - Peningkatan sarana dan prasarana pelatihan pertanian untuk menghasilkan mutu SDM sesuai standar yang ditentukan;
 - Peningkatan kapasitas lembaga sertifikasi profesi pertanian;
 - Penguatan jejaring dan kerjasama pelatihan dengan dunia usaha/dunia industri;
 - Pelatihan literasi keuangan dan akses KUR serta asuransi pertanian bagi petani;
 - Peningkatan kapasitas pemuda tani melalui P4S;
 - Pelatihan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
 - Pelatihan mendukung Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan.
- b. Regenerasi dan Penumbuhan Minat Generasi Muda Pertanian dengan langkah operasional sebagai berikut:
- Penumbuhan dan penguatan P4S terutama dari generasi milenial;
 - Permagangan bagi pemuda tani dalam bidang pertanian di P4S binaan;
 - Fasilitasi penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan;
 - Pengembangan jejaring kerjasama antar pengusaha pertanian milenial;
 - Pendampingan bagi petani milenial dalam literasi keuangan dan akses KUR serta asuransi pertanian;
 - Peningkatan resonansi petani milenial melalui jejaring usaha petani milenial.
- c. Komando Strategis Pembangunan Pertanian;
- Supervisi dan pendampingan pelaksanaan program Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani);

- Penyelenggaraan pelatihan yang mendukung Program Kostratani.
- d. Pengarusutamaan Gender (PUG)
 - Mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya pertanian;
 - Berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta dalam memperoleh manfaat dari pembangunan;
 - Penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan, koordinasi dalam pelaksanaan PUG, baik pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) maupun penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender;
 - Penyediaan dan pemanfaatan data terpilah sebagai dasar untuk melakukan pemetaan dalam rangka mengevaluasi perwujudan kesetaraan dan keadilan gender serta sarana dan prasarana yang responsif gender;
 - Pengembangan inovasi untuk memudahkan pelaksanaan PUG.
- 3. Strategi mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah yang Berorientasi pada Layanan Prima
 - a. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui upaya-upaya sebagai berikut:
 - Penyusunan peta jabatan;
 - Penataan jabatan fungsional;
 - b. Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui:
 - Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi;
 - Penyusunan Peta Proses Bisnis.
 - c. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui:
 - Perluasan implementasi sistem integritas;
 - Penguatan pengelolaan Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi.
 - d. Transformasi pelayanan publik, melalui:
 - Internalisasi budaya pelayanan prima;
 - Pelayanan publik berbasis elektronik (e-service);
 - Penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik;
 - Penguatan ekosistem inovasi.

3.5. Kerangka Kelembagaan

Langkah-langkah strategis perubahan tersebut melalui agenda reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), meliputi:

- a. Aspek kelembagaan, guna melahirkan organisasi yang proporsional, efektif, dan efisien (organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran);
- b. Aspek tata laksana, guna melahirkan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip *good governance*;
- c. Peraturan perundang-undangan, guna melahirkan regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif;
- d. Sumber daya manusia aparatur, guna melahirkan sumber daya manusia aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, *capable*, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera;
- e. Pengawasan, bertujuan meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- f. Akuntabilitas, bertujuan meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi;
- g. Pelayanan publik, untuk mewujudkan pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat; dan
- h. *Mindset* dan *Cultural Set* Aparatur, guna melahirkan birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi.

Aspek kelembagaan dilakukan dengan menata kelembagaan dengan didasari semangat untuk mendorong terwujudnya struktur pemerintahan yang efisien dan efektif sebagai dampak dari kebijakan restrukturisasi organisasi Kementerian dan lembaga.

Aspek SDM aparatur Pembangunan pertanian ke depan dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun internasional yang dinamis, serta penataan simplifikasi birokrasi dengan menghilangkan fungsi pejabat administrator dan pengawas sehingga terwujud aparatur BPPSDMP yang profesional dan dapat mendukung pencapaian kinerja organisasi sesuai dengan target yang ditetapkan. BBPMKP telah memiliki fungsional khusus terdiri atas: (1) Widyaiswara; (2) Perencana; (3) Analis Pengelola Keuangan APBN; (4) Analis Kepegawaian; (5) Pustakawan; (6) Pranata Komputer; (7) Arsiparis; dan (8) Pranata Humas.

Penataan Ketatalaksanaan dilakukan melalui serangkaian proses analisis dan perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas

sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada unit organisasi. Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam upaya mewujudkan ketatalaksanaan yang mampu menjamin efisiensi dan efektivitas pengembangan SDM pertanian. Untuk itu, perlu dilaksanakan kegiatan antara lain peningkatan kualitas ketatalaksanaan yang efektif dan efisien, penyempurnaan prosedur dan tata kerja organisasi, penyusunan dan penyempurnaan sistem dan prosedur serta penyusunan, harmonisasi dan penyempurnaan tata hubungan kerja unit kerja lingkup BBPMKP dan instansi terkait.

Penyederhanaan birokrasi disampaikan Presiden dalam pidato pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2019 – 2024, dengan menyederhanakan eselonisasi menjadi 2 level, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, dan menghargai kompetensi. Upaya yang sedang Kementerian Pertanian melakukan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional, mengalihkan 1.264 jabatan eselon III dan eselon IV menjadi jabatan fungsional, penyusutan birokrasi ditujukan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja.

Pemangkasan jalur birokrasi dan perbaikan sistem manajerial yang dilakukan juga dengan merestrukturisasi program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Pertanian meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran serta meningkatkan kinerja aparatur, selanjutnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian dilaksanakan melalui program-program yang berorientasi pada *outcome*. Program- program tersebut dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan guna mencapai tujuan dalam rangka menciptakan pelayanan publik yang prima, birokrasi yang bersih dan SDM yang profesional.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Rencana Strategis BPPSDMP Tahun 2020-2024 Revisi I memuat bahwa BPPSDMP mengampu 2 (dua) program yaitu: 1) Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian (Fungsi Ekonomi); dan 2) Program Pendidikan Pertanian (Fungsi Pendidikan), namun demikian dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, dan Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas nomor S-122/MK.2/2020 dan B-517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) maka Program yang diampu BPPSDMP direvisi menjadi yaitu: 1) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; dan 2) Program Dukungan Manajemen.

4.1. Struktur Program dan Kegiatan BBPMKP

Sesuai dengan tugas dan fungsi BPPSDMP mengemban dua fungsi program yaitu 1) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; dan 2) Program Dukungan Manajemen maka BBPMKP juga menjalankan dua program yang sama, yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 9
Struktur Program dan Kegiatan Berdasarkan Fungsi

Program	Kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi Pertanian
Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

4.2. Kegiatan Utama BBPMKP

a. Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi Pertanian

Dalam rangka peningkatan kompetensi ilmu terapan dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang kompeten di dunia usaha dan dunia industri serta dunia kerja lainnya melalui pelatihan vokasi, diperlukan pengembangan penyelenggaraan, kurikulum dan metode pembelajaran.

Pengembangan kurikulum vokasi diselaraskan dengan standar kompetensi kerja, permintaan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), dengan tiga kriteria utama yaitu permintaan pasar tenaga kerja (*demand-driven*), keterhubungan antara pemberi kerja (industri) dengan lembaga pendidikan vokasi (*link*), dan kecocokan antara lulusan vokasi dengan pemberi kerja/industri (*match*) dimana tingkat keberhasilan pelatihan vokasi terukur dengan peningkatan hasil kerja dan keterserapan lulusan vokasi sesuai kompetensi dan bidang keahliannya.

Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi Pertanian terkait dengan:

1. Koordinasi

Kegiatan koordinasi ditujukan untuk penguatan penyelenggaraan pelatihan pertanian, dimulai dari pemantapan sistem perencanaan dan evaluasi, penguatan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) yang akuntabel, serta peningkatan kualitas layanan kepegawaian, Tata Usaha (TU) dan Rumah Tangga (RT).

Pemantapan sistem perencanaan mencakup perencanaan program dan kegiatan berbasis kinerja yang merupakan restrukturisasi program dan anggaran berorientasi kepada keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) berdasarkan kebijakan dan prinsip akuntabilitas dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran dengan strategi meliputi:

- a) Koordinasi rencana program, anggaran dan kerjasama;
- b) Pengembangan jejaring kerjasama dalam dan luar negeri;
- c) Penyusunan, pemantauan, pembinaan dan penyempurnaan anggaran dan kegiatan berbasis kinerja;

Pemantapan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan strategi sebagai berikut:

- a) Penguatan data SDM pertanian;
- b) Pengendalian kegiatan melalui penerapan SPI;
- c) Pengembangan dan penguatan sistem;
- d) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- e) Sistem pelaporan dan pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP).

Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang berfokus pada penerapan sistem pelaporan keuangan negara secara tertib dan menyeluruh dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dan aset negara melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang menunjang laporan keuangan Kementerian Pertanian dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), strategi tersebut meliputi:

- a) Intensifikasi dan ekstensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- b) Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana untuk kebutuhan pelatihan;
- c) Akuntabilitas laporan keuangan;
- d) Pengawasan, pengendalian dan penyelesaian aset BMN dan keuangan;
- e) Pengembangan tata kelola keuangan.

Peningkatan kualitas layanan kepegawaian, TU dan RT menitikberatkan pada pemantapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan penguatan kehumasan. Pemantapan pelaksanaan RB melalui proses penataan organisasi, ketatalaksanaan dan pemberdayaan SDM aparatur dalam rangka mewujudkan pemerintah yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik. Penguatan kehumasan melalui peningkatan intensitas dan kualitas komunikasi melalui media informasi dalam rangka meningkatkan eksistensi dan citra positif Lembaga. Adapun strateginya meliputi:

- a) Perencanaan dan pengembangan kepegawaian;
- b) Penyempurnaan organisasi dan tata laksana;
- c) Sosialisasi peraturan perundangan;
- d) Pengelolaan informasi dan dokumentasi berbasis digital;
- e) Penyebaran informasi melalui media cetak, elektronik, dan teknologi informasi;

2. Sarana Pelatihan Pertanian
3. Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
4. Pelatihan Vokasi Pertanian bagi Aparatur
5. Pelatihan Pertanian bagi Non Aparatur.

- b. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
- Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya diturunkan dalam:
1. Layanan Dukungan Manajemen Internal, yang terdiri dari beberapa kegiatan:
 - a) Layanan Perkantoran
 - b) Operasional dan Pemeliharaan Kantor
 - c) Penyelenggaraan Operasional Satker
 - d) Perawatan Gedung Kantor Langganan Daya dan Jasa
 - e) Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6/10
 - f) Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2
 - g) Pengadaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor
 - h) Perawatan Sarana Gedung
 - i) Perbaikan Peralatan/ Barang Inventaris Kantor
 - j) Pengadaan Pakaian Dinas.
 2. Layanan Manajemen SDM Internal, yang mencakup Layanan Pendidikan dan Pelatihan bagi SDM lingkup Kementerian Pertanian yang berupa kegiatan Pelatihan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan/atau Aparatur, juga kegiatan peningkatan kompetensi ketenagaan pelatihan internal BBPMKP yang dapat berupa Pelatihan/Workshop/Webinar/Sosialisasi/Orasi.

4.3. Sasaran BBPMKP

- a. Pengembangan kapasitas kelembagaan dan ketenagaan pelatihan:
1. Terwujudnya BBPMKP sebagai lembaga yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;
 2. Terwujudnya BBPMKP sebagai lembaga pelatihan yang terakreditasi;
 3. Terpeliharanya ISO;
 4. Terlaksananya kegiatan sesuai SOP;
 5. Terwujudnya program dukungan manajemen;
 6. Terwujudnya Inkubator Usaha Tani;
 7. Terfasilitasinya sarana dan prasarana, ketenagaan dan penyelenggaraan pelatihan di 336 unit P4S;
 8. Meningkatnya kapasitas 125 orang Aparatur di BBPMKP;

9. Terlaksananya peningkatan kompetensi 2.529 orang tenaga pelatihan dan Aparatur Sipil Negara lingkup Kementerian Pertanian.
- b. Pengembangan manajemen mutu penyelenggaraan pelatihan
 1. Meningkatkan kompetensi 13.284 aparatur dan non aparatur melalui Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan pelatihan dalam jabatan (Pelatihan kepemimpinan, pelatihan fungsional, pelatihan administrasi dan manajemen, pelatihan teknis dan pelatihan kewirausahaan untuk mendukung program prioritas dan pengembangan kawasan pertanian serta Reformasi Birokrasi yang responsif gender;
 2. Penerapan SKKNI bidang manajemen, kepemimpinan, dan multimedia pertanian dalam sertifikasi profesi;
 3. Berkembangnya model dan teknik pelatihan pertanian berbasis digital sesuai dengan permintaan pasar;
 4. Terlaksananya kegiatan koordinasi, sosialisasi, Bimtek, dan pelaporan pelatihan pertanian;
 5. Berkembangnya sistem pemantauan dan evaluasi serta meningkatnya pengendalian penyelenggaraan pelatihan;
- c. Pengembangan jejaring kerjasama pelatihan pertanian dalam dan luar negeri
 1. Meningkatkan promosi, publikasi, dan sosialisasi kelembagaan pelatihan melalui berbagai media informasi seperti pameran, profil, media cetak, elektronik, diorama, *display*;
 2. Terlaksananya kegiatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kerjasama pelatihan dan permagangan pertanian dalam dan luar negeri dengan pihak terkait;
 3. Tersusunnya standar biaya penyelenggaraan pelatihan kerjasama;
 4. Meningkatkan jejaring kerjasama pelatihan dan/atau permagangan dalam dan luar negeri serta sumber pembiayaannya.

4.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)/ Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) Dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)

4.4.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) digunakan sebagai acuan ukuran kinerja yang digunakan di level 1 (eselon I). Mengacu pada IKU yang ingin dicapai oleh Kementerian Pertanian maka BPPSDMP juga menetapkan IKU/IKSP yang ingin dicapai. Adapun IKU/IKSP BPPSDMP tahun 2020-2024 pada dokumen Rencana Strategis BPPSDMP Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 10
Indikator Kinerja Utama/Indikator Kerja Sasaran Program BPPSDMP
Tahun 2020-2024

NO	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	IKU/IKSP
1	Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian	Termanfaatkannya teknologi pertanian	Teknologi yang diterapkan oleh petani (%)
		Meningkatnya kualitas SDM dan Kelembagaan Pertanian Nasional	Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya (%)
			Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya (%)
		Birokrasi BPPSDMP yang efektif dan efisien	Nilai penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPPSDMP
		Terkelolanya anggaran BPPSDMP yang akuntabel dan berkualitas	Nilai kinerja anggaran BPPSDMP
2	Pendidikan Pertanian	Meningkatnya SDM dan Kelembagaan Pertanian Nasional	Lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian (%)

Sumber: Renstra BPPSDMP Tahun 2020-2024.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor: 226/Kpts/RC.020/I/10/2021 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor

278/KPTS/RC.020/I/11/2020 Tentang Rencana Strategis Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Tahun 2020-2024, maka IKU/IKSP BPPSDMP tahun 2020-2024 juga disesuaikan sebagai berikut:

Tabel 11
Indikator Kinerja Utama/Indikator Kerja Sasaran Program BPPSDMP
Tahun 2020-2024 (Revisi)

NO	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	IKU/IKSP
1	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Termanfaatkannya teknologi pertanian	Teknologi yang diterapkan oleh petani (%)
		Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian nasional	Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya (%)
		Meningkatnya kualitas kelembagaan pertanian nasional	Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya (%)
2	Dukungan Manajemen	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPPSDMP
		Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran BPPSDMP (Nilai)

Sumber: Renstra BPPSDMP Tahun 2020-2024 Revisi II.

4.4.2. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) merupakan ukuran keberhasilan suatu sasaran kegiatan di level 2 atau eselon II pada Puslatan dan UPT Pelatihan Pertanian seperti BBPMKP. Mengacu pada Renstra BPPSDMP Tahun 2020-2024, BBPMKP menetapkan IKSK Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian (awal) dengan acuan IKU/IKSP BPPSDMP dan IKSK Puslatan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 12
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian
BBPMKP Tahun 2020-2024

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)
Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pertanian nasional	Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya (%)
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BBPMKP	Terwujudnya Birokrasi BBPMKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan prima	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BBPMKP
	Terkelolanya anggaran BBPMKP yang akuntabel dan berkualitas	Persentase rekomendasi revidi laporan keuangan BBPMKP yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
		Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti BBPMKP terhadap temuan total BPK atas laporan keuangan BBPMKP

Adapun rincian IKS dan output kegiatan untuk periode tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 13
Rincian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan BBPMKP
Tahun 2020-2024

SK	IKSK	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian nasional	Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya (%)	%	60	75	80	85	90
Terwujudnya Birokrasi BBPMKP Ciawi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BBPMKP	Nilai/ Skala	94,45	33,50	33,75	34,00	34,25

SK	IKSK	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Terkelolanya anggaran BBPMKP Ciawi yang akuntabel dan berkualitas	Persentase rekomendasi revidi laporan keuangan BBPMKP yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti BBPMKP terhadap total temuan BPK atas laporan Keuangan BBPMKP	%	90,00	90,20	90,40	90,60	90,80

Adanya perubahan Rencana Strategis BPPSDMP Tahun 2020 – 2024 yang termuat dalam Revisi II, maka BBPMKP juga melakukan perubahan IKS sebagai berikut:

Tabel 14
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan BBPMKP Tahun 2020-2024 (Revisi I)

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)
Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi Pertanian	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian melalui pelatihan vokasi pertanian	Persentase sumber daya manusia pertanian yang meningkat kapasitasnya (%)
	Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian	Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan pertanian (Skala Likert 1-4)

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BBPMKP	Terwujudnya Birokrasi BBPMKP Ciawi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BBPMKP Ciawi
	Meningkatnya tata kelola anggaran BBPMKP Ciawi	Nilai Kinerja Anggaran BBPMKP Ciawi

Adapun perubahan rincian IKS dan output kegiatan untuk periode tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 15
Rincian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan BBPMKP Tahun 2020-2024 (Revisi I)

SK	IKSK	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian melalui pelatihan vokasi pertanian	Persentase sumber daya manusia pertanian yang meningkat kapasitasnya (%)	%	60	75	80	85	90
Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian	Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan pertanian (Skala Likert 1-4)	Skala	3,90	3,91	3,92	3,93	3,94
Terwujudnya Birokrasi BBPMKP Ciawi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BBPMKP Ciawi	Nilai	33,25	33,50	33,75	34,00	34,25
Meningkatnya tata kelola anggaran BBPMKP Ciawi	Nilai Kinerja Anggaran BBPMKP Ciawi	Nilai	90,00	90,20	90,40	90,60	90,80

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 dan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 279/Kpts/OT.050/M/06/2023, maka nomenklatur BBPMKP berubah menjadi BBPMKP dengan perubahan IKS K Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian sebagai berikut:

Tabel 16
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan BBPMKP Tahun 2020-2024 (Revisi II)

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)
Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi Pertanian	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian melalui pelatihan vokasi pertanian	Persentase sumber daya manusia pertanian yang meningkat kapasitasnya (%)
	Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian	Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan pertanian (Skala Likert 1-4)
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BBPMKP	Terwujudnya Birokrasi BBPMKP Ciawi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BBPMKP Ciawi
	Meningkatnya tata kelola anggaran BBPMKP Ciawi	Nilai Kinerja Anggaran BBPMKP Ciawi

Adapun rincian IKS K dan output kegiatan untuk periode tahun 2020-2024 juga mengalami perubahan sebagai berikut:

Tabel 17
Rincian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan BBPMKP Tahun 2020-2024 (Revisi II)

SK	IKSK	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian melalui pelatihan vokasi pertanian	Persentase sumber daya manusia pertanian yang meningkat kapasitasnya (%)	%	60	75	80	85	90
Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian	Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan pertanian (Skala Likert 1-4)	Skala	3,90	3,91	3,92	3,93	3,94
Terwujudnya Birokrasi BBPMKP Ciawi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BBPMKP Ciawi	Nilai	33,25	33,50	33,75	34,00	34,25
Meningkatnya tata kelola anggaran BBPMKP Ciawi	Nilai Kinerja Anggaran BBPMKP Ciawi	Nilai	90,00	90,20	90,40	88,50	90,80

4.5. Kerangka Pendanaan

Pada tahun 2020, BBPMKP menetapkan target kinerja dan kerangka pendanaan berdasarkan target yang telah ditetapkan oleh BPPSDMP dan Puslatan, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 18
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian BBPMKP Tahun 2020

Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
		2020	2020	
KEGIATAN PEMANTAPAN SISTEM PELATIHAN PERTANIAN			23.698.116.000	BBPMKP

Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
		2020	2020	
SK1 Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional			2.414.754.000	
IKSK1. Persentase SDM pertanian dan kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	%	60	2.414.754.000	BBPMKP
Pelatihan Vokasi Bidang Pertanian dan Pelatihan mendukung Program Prioritas Pembangunan Pertanian (orang)	orang	544	2.238.523.000	
Penumbuhan dan Penguatan Kewirausahaan P4S (unit)	unit	22	176.231.000	
SK2 Terwujudnya Birokrasi BBPMKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan prima			21.283.362.000	
IKSK2. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BBPMKP	Nilai	94,45	21.283.362.000	BBPMKP
Layanan Dukungan Manajemen Pelatihan (layanan)	layanan	1	2.220.819.000	
Layanan Sarana Prasarana Internal (layanan)	layanan	1	2.004.105.000	
Layanan Perkantoran (layanan)	layanan	1	17.058.438.000	
SK3 Terkelolanya anggaran BBPMKP yang akuntabel dan berkualitas			21.283.362.000	
IKSK3. Persentase rekomendasi revidi laporan keuangan BBPMKP yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	%	90	21.283.362.000	BBPMKP
Layanan Dukungan Manajemen Pelatihan (layanan)	layanan	1	2.220.819.000	
Layanan Sarana Prasarana Internal (layanan)	layanan	1	2.004.105.000	
Layanan Perkantoran (layanan)	layanan	1	17.058.438.000	
IKSK4. Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti BBPMKP terhadap temuan total BPK atas laporan keuangan BBPMKP	%	90	21.283.362.000	BBPMKP
Layanan Dukungan Manajemen Pelatihan (layanan)	layanan	1	2.220.819.000	
Layanan Sarana Prasarana Internal (layanan)	layanan	1	2.004.105.000	
Layanan Perkantoran (layanan)	layanan	1	17.058.438.000	

Adapun target kinerja dan kerangka pendanaan BBPMKP untuk tahun 2021-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 19
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan
Pertanian BBPMKP Tahun 2021-2022

Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan/Output Kegiatan			Satuan	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Pelaksana Organisasi
				2021	2022	2021	2022	
KEGIATAN PEMANTAPAN SISTEM PELATIHAN PERTANIAN						36.246.468.000	28.769.101.000	BBPMKP
SK1	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional					8.614.631.000	2.604.705.000	
		IKSK1. Persentase SDM pertanian dan kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	%	75	80	8.614.631.000	2.604.705.000	BBPMKP
		Pelatihan Vokasi Pertanian bagi Aparatur (orang)	Orang	2.571	650	5.533.940.000	2.604.705.000	
		Pelatihan Pertanian bagi Non Aparatur (orang)	Orang	1.670	-	3.080.691.000	-	
SK2	Terwujudnya Birokrasi BBPMKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan prima					22.540.182.000	23.619.664.000	
		IKSK2. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan	Nilai	33,50	33,75	22.540.182.000	23.619.664.000	BBPMKP

Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Pelaksana Organisasi
		2021	2022	2021	2022	
Reformasi Birokrasi BBPMKP						
Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal (orang)	Orang	581	801	4.589.100.000	6.327.012.000	
Layanan Perkantoran (layanan)	Layanan	1	1	17.951.082.000	17.292.652.000	
SK ₃ Terkelolanya anggaran BBPMKP yang akuntabel dan berkualitas				4.786.155.000	2.544.732.000	
IKSK ₃ . Persentase rekomendasi revidi laporan keuangan BBPMKP yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	%	90,20	90,40	2.200.761.000	800.000.000	BBPMKP
Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan (kegiatan)	Kegiatan	7	7	2.200.761.000	800.000.000	
IKSK ₄ . Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti BBPMKP terhadap temuan total BPK atas laporan keuangan BBPMKP	%	90,20	90,40	2.585.394.000	1.744.732.000	BBPMKP

Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan/Output Kegiatan			Satuan	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Pelaksana Organisasi
				2021	2022	2021	2022	
		Penumbuhan dan Penguatan P4S (unit)	Lembaga	11	11	486.000.000	435.800.000	
		Sarana Pelatihan Pertanian	Unit	1	1	2.099.394.000	1.308.932.000	

Setelah mengalami perubahan nomenklatur, BBPMKP menetapkan target kinerja dan kerangka pendanaan BBPMKP untuk tahun 2023-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 20
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan
Pertanian BBPMKP Tahun 2023-2024

Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan/Output Kegiatan			Satuan	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Pelaksana Organisasi
				2023	2024	2023	2024	
KEGIATAN PEMANTAPAN SISTEM PELATIHAN PERTANIAN					23.788.884.000	25.521.153.000	BBPMKP	
SK1	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional				1.014.000.000	740.600.000		
	IKSK1. Persentase SDM pertanian dan kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	%	85	90	1.014.000.000	740.600.000	BBPMKP	
	Pelatihan Vokasi Pertanian bagi Aparatur (orang)	Orang	90	60	414.000.000	270.000.000		
	Pelatihan Pertanian bagi Non Aparatur (orang)	Orang	360	202	600.000.000	470.600.000		
SK2	Terwujudnya Birokrasi BBPMKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan prima				20.104.663.000	22.259.280.000		
	IKSK2. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BBPMKP	Nilai	34,00	34,25	20.104.663.000	22.259.280.000	BBPMKP	

Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan/Output Kegiatan			Satuan	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Pelaksana Organisasi
				2023	2024	2023	2024	
		Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal (orang)	Orang	125	125	2.518.579.000	3.866.496.000	
		Layanan Perkantoran (layanan)	Layanan	1	1	17.586.084.000	17.822.784.000	
		Layanan Sarana Internal (unit)	Unit	-	1	-	570.000.000	
SK3		Terkelolanya anggaran BBPMKP yang akuntabel dan berkualitas				2.670.221.000	2.521.273.000	
		IKSK3. Persentase rekomendasi revidi laporan keuangan BBPMKP yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	%	88,50	90,80	790.300.000	875.000.000	BBPMKP
		Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan (kegiatan)	Kegiatan	7	7	790.300.000	875.000.000	

Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Pelaksana Organisasi
			2023	2024	2023	2024	
	IKSK4. Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti BBPMKP terhadap temuan total BPK atas laporan keuangan BBPMKP	%	88,50	90,80	1.879.921.000	1.646.273.000	BBPMKP
	Penumbuhan dan Penguatan P4S (unit)	Lembaga	19	19	668.287.000	656.890.000	
	Sarana Pelatihan Pertanian	Unit	1	1	1.211.634.000	989.383.000	

BAB VI

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 di bidang pertanian khususnya peningkatan kualitas SDM. Dokumen ini menggambarkan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan pelatihan pertanian untuk 5 (lima) tahun mendatang, dan disusun dengan mengacu kepada capaian tahun 2015 - 2019, permasalahan dan tantangan yang dihadapi, serta Renstra BPPSDMP dan Puslatan tahun 2020-2024.

BBPMKP sebagai salah satu UPT Pelatihan dari BPPSDMP berkewajiban untuk mengimplementasikan sasaran kebijakan umum (visi), strategi utama (misi), tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra BPPSDMP Tahun 2020-2024. Renstra ini tidak hanya digunakan sebagai pedoman dan arah dalam penetapan kegiatan operasional di BBPMKP dalam mendukung program utama dan program strategis Kementerian Pertanian, namun juga sebagai dasar evaluasi dan pelaporan kinerja.

Perubahan nomenklatur Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) menjadi Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) juga memerlukan adanya revisi ketiga terhadap Renstra yang telah disusun sebelumnya.

Penguatan peran *stakeholders* perlu dilakukan untuk mendukung pelaksanaan Renstra BBPMKP Tahun 2020-2024, melalui proses sosialisasi, baik kepada masyarakat luas maupun perusahaan-perusahaan, serta seluruh komponen terkait demi terwujudnya pertanian maju, mandiri dan modern untuk mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

KEPALA BALAI BESAR

YUSRAL TAHIR